



Australian Government

# BUKU PANDUAN UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA

---

**KULIAH KERJA  
NYATA TEMATIK**

**KOMPAK**

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*



# **PANDUAN TEKNIS**

## **Universitas Membangun Desa - Kuliah Kerja Nyata Tematik**

**Tutik Rachmawati**

**KOMPAK**

PANDUAN TEKNIS

UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA - KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Cetakan pertama/Oktober/2020

ISBN: 978-623-6080-12-2

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

**Penulis:**

Tutik Rachmawati

**Kontributor:**

Azwar Hasan

Citra Aulia

Enurlaela Hasanah

Nasthain Gasba

Susana Dewi

Ratna Fitriani

Emmy

LP2M Universitas Mataram

Tim Teknis UMD Kabupaten Pangkep

**Editor:**

*Communication & Knowledge Management KOMPAK*

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id). Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

# Daftar Isi

## **Pengantar Direktur Jenderal Pembangunan Wilayah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Pengantar Team Leader KOMPAK</b>  | <b>vii</b> |
| <b>Latar Belakang</b>  | <b>1</b>   |
| <b>A. Tujuan dan Target Perubahan</b>  | <b>3</b>   |
| 1. UMD-KKN Tematik adalah Perubahan itu Sendiri  | 3          |
| 2. Target Perubahan yang Ditetapkan oleh Masing-Masing Universitas   | 6          |
| a. Target Perubahan yang Disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah<br>dan Permasalahan Pembangunan Desa Mitra | 7          |
| b. Memastikan Bahwa UMD-KKN Tematik Membawa Perubahan  | 7          |
| 3. Aspek GESI dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Model UMD-KKN Tematik  | 8          |
| <b>B. Dampak yang diharapkan</b>   | <b>13</b>  |
| 1. Dampak pada Perguruan Tinggi  | 13         |
| a. Individual: Dosen dan Mahasiswa   | 13         |
| b. Institusional (Lembaga) Perguruan Tinggi  | 17         |
| 2. Dampak Pada Pemerintah Daerah   | 18         |
| 3. Dampak Pada Desa  | 19         |
| <b>C. Manajemen UMD</b>  | <b>24</b>  |
| 1. Kepemimpinan  | 24         |
| 2. Pelembagaan Komitmen Lembaga, Anggaran dan Aturan   | 26         |
| 3. Pemanfaatan Sumber Daya   | 29         |
| 4. Pemanfaatkan Jejaring Multipihak, Perluas Dampak  | 30         |
| <b>D. Teknis Pengelolaan UMD-KKN Tematik</b>   | <b>33</b>  |
| Lembaga Pengampu dan Pelaksana Kegiatan  | 33         |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Tahapan Pelaksanaan  | 35        |
| a. Persiapan Pelaksanaan  | 36        |
| 1. Seleksi Dosen Pembimbing Lapangan  | 36        |
| 2. Pembekalan   | 37        |
| 3. Pra-KKN  | 37        |
| 4. Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembekalan  | 39        |
| 5. Komunikasi   | 39        |
| b. Penerjunan Mahasiswa ke Desa-desa Lokasi UMD-KKN   | 40        |
| c. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang Telah Direncanakan dan <i>Monitoring</i> oleh Dosen Pembimbing Lapangan | 40        |
| d. Pelaporan dan Evaluasi   | 41        |
| 2. Indikator dalam Model UMD-KKN Tematik  | 43        |
| 3. Potensi Keberlanjutan Model UMD-KKN Tematik  | 45        |
| 4. Potensi Pengembangan, Perluasan, dan Replikasi   | 47        |
| 5. Perhitungan Pembiayaan   | 50        |
| <b>Penutup</b>  | <b>54</b> |

# Daftar Kotak

## REKOMENDASI

|  |    |
|--|----|
| Kotak Rekomendasi 1. Membuka Diri Untuk Perubahan                                      | 4  |
| Kotak Rekomendasi 2. Referensi Metode/Alat Penentuan Perubahan                         | 7  |
| Kotak Rekomendasi 3. Menetapkan Dampak   | 22 |
| Kotak Rekomendasi 4. Manajemen UMD, Pentingnya Aspek Kepemimpinan                      | 25 |
| Kotak Rekomendasi 5. Pelembagaan Komitmen  | 27 |
| Kotak Rekomendasi 6. Lembaga Pengampu  | 34 |
| Kotak Rekomendasi 7. Tahapan Pelaksanaan   | 38 |
| Kotak Rekomendasi 8. Indikator yang Terukur – KKN Tematik Adminduk Universitas Mataram | 44 |
| Kotak Rekomendasi 9. Pengembangan, Perluasan dan Replikasi                             | 48 |
| Kotak Rekomendasi 10. Pembiayaan   | 52 |

## REFERENSI

|  |   |
|--|---|
| Kotak Referensi 1. Metode/Alat Penentuan Perubahan | 8 |
|--|---|

## PRAKTIK BAIK

|   |    |
|---|----|
| Kotak Praktik Baik 1. Perubahan Cara Berinteraksi, Memulai Sinergi                          | 5  |
| Kotak Praktik Baik 2. Dampak, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur                            | 21 |
| Kotak Praktik Baik 3. Manajemen UMD, Aspek Kepemimpinan di Kabupaten Pangkep                | 26 |
| Kotak Praktik Baik 4. Pelembagaan Komitmen, Pembentukan Tim Teknis UMD di Kabupaten Pangkep | 28 |
| Kotak Praktik Baik 5. Pentingnya Berjejaring  | 31 |
| Kotak Praktik Baik 6. Tim Teknis UMD Kabupaten Pangkep                                      | 34 |
| Kotak Praktik Baik 7. Indikator yang Terukur, KKN Tematik Adminduk Unram                    | 44 |
| Kotak Praktik Baik 8. Pengembangan dan Perluasan – Unej Goes to Pangkep                     | 49 |
| Kotak Praktik Baik 9. Pengembangan dan Perluasan – Universitas Katolik Parahyangan          | 49 |
| Kotak Praktik Baik 10. Pengembangan dan Perluasan – UIN Ar-Raniry                           | 50 |

## TESTIMONI

|   |    |
|---|----|
| Kotak Testimoni 1. Dampak bagi Mahasiswa, Pembelajaran, dan Pengalaman    | 14 |
| Kotak Testimoni 2. Universitas Megarezky, Menjalin Ikatan Kembali ke Desa | 17 |
| Kotak Testimoni 3. Pemerintah Daerah dan Dampak                           | 19 |
| Kotak Testimoni 4. Pemerintah Desa dan Dampak                             | 20 |

# Kata Pengantar

Indonesia memiliki 74.961 desa yang termasuk dalam 514 kabupaten/kota. Jumlah yang sangat besar yang menjadikan pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang selama ini memiliki keterlibatan tinggi dalam pembangunan masyarakat di desa. Perguruan tinggi diharapkan mendukung pembangunan desa di Indonesia, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya besar di desa, salah satunya melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Setiap Perguruan tinggi di Indonesia memiliki Program KKN yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat di desa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Bersama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memprakarsai model Universitas Membangun Desa (UMD) sebagai upaya untuk mengoptimalkan program KKN. Model pelaksanaan KKN berubah dari yang sebelumnya dinilai tidak memiliki fokus, menjadi KKN Tematik, dimana mahasiswa bersama desa membangun sesuai potensi dan kebutuhannya. KKN Tematik diharapkan dapat menciptakan sebuah hasil nyata di masyarakat di berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya dan dapat dioptimalkan untuk menjadi alternatif pendampingan pelaksanaan program-program pemerintah untuk hasil yang lebih baik. Melalui program ini, potensi dan sumber daya yang ada diintegrasikan untuk memberikan dampak yang lebih optimal untuk desa, komunitas, dan pemerintah lokal.

Kemendesa PDTT mendukung Model UMD-KKN Tematik yang merupakan platform inovatif yang mendorong kerjasama multi pihak untuk menjalankan kegiatan KKN Tematik di desa. Harapannya, platform ini dapat menghubungkan lebih banyak pihak di masa depan. Salah satu contoh, UMD-KN Tematik yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. KKN Tematik ini merupakan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan 17 perguruan tinggi di Indonesia



yang dilaksanakan dengan berbagai tema seperti stunting, desa wisata, desa cerdas (digitalisasi), pengembangan ekonomi lokal (PEL), atau sektor lain sesuai permasalahan yang dihadapi desa. Program ini menjadi salah satu program yang dianggap berhasil karena dapat melibatkan berbagai stakeholder dari perguruan tinggi, kementerian/ lembaga, serta swasta diantaranya Tokopedia dan FishOn.

Dalam jangka panjang, model UMD-KKN Tematik yang telah dilengkapi dengan platform digital Inspirasi UMD, diharapkan dapat menjadi rujukan oleh perguruan tinggi atau institusi lainnya. Desa-desanya juga dapat mereplikasi pola kerja sama multi pihak dalam upaya pembangunan desa di berbagai sektor, dan melaksanakan program-program yang diminati dengan memanfaatkan Dana Desa yang saat ini difokuskan untuk perwujudan 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Desa dapat memilih program kegiatan dari platform Inspirasi UMD yang sesuai dengan kondisi desa, untuk dapat mencapai fokus perwujudan dari 18 SDGs Desa.

Jakarta, 15 Desember 2020  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Daerah Tertinggal



**Samsul Widodo**

# Kata Pengantar

Model Universitas Membangun Desa (UMD) merupakan salah satu inisiatif yang difasilitasi oleh KOMPAK melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Model ini lahir dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang sudah ada selama ini, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau bentuk program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, untuk ikut berkontribusi dalam membangun desa.

Banyak program pengabdian masyarakat yang diimplementasikan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, program-program pengabdian masyarakat ini, terutama kegiatan KKN, belum termanfaatkan secara optimal dan bersifat insidental. Di sisi lain, apabila KKN dikelola dengan baik lewat perencanaan dan pelibatan berbagai aktor pembangunan desa, bukan mustahil impian untuk desa menjadi garda terdepan ketahanan masyarakat dan bangsa Indonesia akan terwujud.

KOMPAK bersama Kemendesa PDTT mencoba memfasilitasi dan mendorong perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi kegiatan KKN dalam membangun desa lewat pendekatan UMD. Sejak diujicobakan pada tahun 2016 bersama dengan empat perguruan tinggi, kami sangat bangga dengan capaian UMD dan dampaknya terhadap desa. Hingga akhir 2020, model KKN UMD telah meluas dan diterapkan oleh 30 perguruan tinggi di 531 desa, 16 kabupaten dan 6 provinsi di wilayah kerja dan di luar wilayah kerja KOMPAK.

Untuk itu, kami mengembangkan Panduan Teknis KKN UMD Tematik ini dengan harapan lebih banyak lagi perguruan tinggi dan aktor yang terlibat dalam pembangunan desa. Selain berisi tentang bagaimana teknis pengelolaan serta manajemen UMD KKN Tematik, panduan ini juga berisi praktik-praktik baik yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran pelaksanaan KKN di masa mendatang. Kami juga mendorong seluruh pihak yang terlibat menggunakan platform online Inspirasi UMD (<https://inspirasi-umd.id>) untuk saling berbagi informasi dan inspirasi serta membangun jejaring yang lebih baik guna mempercepat pembangunan desa.



**Anna Winoto**  
Team Leader  
KOMPAK

# Panduan Teknis Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)-KKN Tematik

## Latar Belakang

Di Indonesia terdapat ribuan perguruan tinggi dengan berbagai program pengabdian masyarakat. Sayangnya, program-program pengabdian masyarakat ini, terutama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang setiap tahunnya melibatkan puluhan ribu mahasiswa, lebih bersifat administratif sebagai syarat kelulusan mahasiswa belaka dan kurang berdampak pada masyarakat desa itu sendiri. Ditambah lagi, pelaksanaan KKN selama ini tidak didahului dengan peninjauan atau pengukuran terhadap kebutuhan desa sehingga manfaat dari pelaksanaan KKN tidak maksimal.

KOMPAK menyadari bahwa sumber daya dan potensi berupa ribuan perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan kegiatan KKN atau kegiatan sejenis setiap tahunnya dapat dimanfaatkan langsung untuk pembangunan desa. Bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), sejak tahun 2016, KOMPAK melakukan uji coba pendekatan Universitas Membangun Desa (UMD). Kerja sama ini mengupayakan pelaksanaan kegiatan KKN yang lebih berdaya guna, khususnya untuk pembangunan desa yang diharapkan mampu mengubah persepsi dan kerangka pikir pemangku jabatan terhadap kegiatan KKN dan sejenisnya. Para pemangku kebijakan diharapkan mau dan mampu melihat kegiatan KKN atau kegiatan yang serupa sebagai sebuah aset lokal (*existing local resources*) dalam membangun desa, bukan sekadar sebagai sebuah kegiatan rutinitas mahasiswa sebelum menjadi sarjana.

UMD tidak dirancang sebagai sebuah program, tapi lebih sebagai sebuah pendekatan yang mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam membangun desa. Pendekatan ini memanfaatkan kegiatan KKN atau kegiatan pengabdian serupa yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam membangun desa dan menghasilkan dampak yang lebih besar untuk masyarakat desa, komunitas, dan pemerintah daerah di mana kegiatan dilaksanakan.

Dokumen Pelaksanaan UMD-KKN Tematik ini disusun sebagai panduan teknis untuk berbagai pihak terutama perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pihak lain yang berencana menerapkan model UMD-KKN Tematik. Bagi perguruan tinggi, Panduan Teknis Pelaksanaan UMD-KKN Tematik ini diharapkan menjadi panduan detail bagaimana melaksanakan model UMD mulai dari persiapan hingga evaluasi. Bagi pemerintah (baik desa, daerah, provinsi, pusat, kementerian, maupun lembaga), dokumen ini diharapkan menjadi panduan untuk menginisiasi dan melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan model UMD-KKN Tematik.

Panduan ini disusun sebagai sebuah kontribusi pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan keberhasilan uji coba model KKN Tematik dan pembelajaran pelaksanaan UMD sejak tahun 2016-2020 dan merupakan sebuah upaya untuk membangun program berdasarkan praktik baik dan bukti nyata.



*KKN Tematik Adminduk, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara (Dok. Universitas Mataram)*

## A. Tujuan dan Target Perubahan

UMD-KKN Tematik memang bertujuan untuk membuat perubahan dalam pelaksanaan model pengabdian masyarakat yang telah ada sebelumnya, agar menghasilkan dampak yang lebih besar untuk masyarakat desa, komunitas, hingga pemerintah daerah. Untuk itu, penting dalam memastikan tujuan dan target perubahan dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tiga hal, yaitu:

### 1. UMD-KKN Tematik adalah Perubahan itu Sendiri

#### a. Pola Pelaksanaan yang Berbeda

UMD-KKN Tematik dilaksanakan dengan pola yang berbeda dari pelaksanaan KKN Tematik dan model KKN konvensional lainnya. KKN Tematik dan KKN konvensional umumnya dilaksanakan perguruan tinggi dengan mengirimkan mahasiswa ke desa-desa tanpa ada sinergi ataupun kolaborasi secara formal dengan pemerintah desa atau kabupaten. UMD-KKN Tematik mengutamakan kolaborasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, bahkan swasta. Kolaborasi diharapkan terbentuk sebagai wujud dari pemahaman pemerintah daerah bahwa pelaksanaan KKN merupakan sebuah kebutuhan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga kolaborasi diharapkan berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan terhadap pembangunan di desa.

#### b. Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik melibatkan kolaborasi tiga aktor utama pembangunan:

- pemerintah desa,
- pemerintah daerah (kabupaten), dan
- perguruan tinggi.
- lebih lanjut, pihak swasta.

Bagi para aktor utama ini, UMD-KKN Tematik merupakan sebuah agenda perubahan. UMD-KKN Tematik adalah perubahan itu sendiri yang mengubah cara berpikir perguruan tinggi dan pemerintah daerah terhadap KKN.

#### c. Perubahan Cara Berpikir

Perubahan cara berpikir lebih sering dimulai dengan persinggungan terhadap aspek atau aktor eksternal. UMD-KKN Tematik diperkenalkan dan digerakkan oleh aktor dari luar pelaksana KKN, yaitu KOMPAK yang terinspirasi dari fakta

bahwa ribuan mahasiswa melaksanakan KKN hanya sebagai syarat administratif kelulusan. KOMPAK kemudian menjadi jembatan interaksi antara perguruan tinggi dengan pemerintah kabupaten. Perlu dipahami bahwa keterlibatan KOMPAK sifatnya sementara, sehingga setiap perguruan tinggi yang hendak mengadopsi model UMD harus menginisiasi komunikasi dan interaksi dengan pemerintah daerah dan pihak lain secara mandiri. Kehadiran KOMPAK perlu diperhitungkan sebagai sesuatu yang tidak berkelanjutan, sehingga perguruan tinggi perlu memikirkan alternatif platform komunikasi dan interaksi yang lebih berkelanjutan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam UMD.

#### **d. Menjaga Keberlanjutan dari Perubahan**

Sebagai keberlanjutan model ini, KOMPAK mengembangkan sebuah platform digital (Inspirasi UMD) pasca uji coba model UMD-KKN. Platform ini menghubungkan perguruan tinggi, desa, dan pihak swasta, baik komunitas maupun individu, untuk memulai kolaborasi melalui pelaksanaan KKN Tematik ini yang bisa diakses di <https://inspirasi-umd.id/>.

#### **Kotak Rekomendasi 1. Membuka Diri Untuk Perubahan**

- Perguruan tinggi harus mengubah cara pandang maupun memperlakukan KKN dari hanya sekadar sebuah keharusan akademik, yaitu dharma pengabdian masyarakat, menjadi sebuah program yang berpotensi besar mendorong dan mempercepat pembangunan desa.
- Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa juga harus mengubah cara berpikir tentang KKN dan meyakini bahwa kolaborasi dalam pembangunan melalui pelaksanaan model UMD-KKN Tematik adalah kebutuhan pembangunan dan menjadi salah satu solusi bagi pemecahan masalah pembangunan di desa.
- Pemerintah kabupaten dapat mulai membuka diri terhadap peran perguruan tinggi dalam berkontribusi terhadap pembangunan di desa.
- Sebagai perwujudan komitmen, perguruan tinggi harus memiliki peta jalan atau *roadmap* jangka menengah (tiga hingga lima tahun) pendampingan desa mitra.
- Desa mitra yang akan didampingi oleh perguruan tinggi perlu diseleksi. Dalam memilih desa mitra, baik perguruan tinggi maupun pemerintah kabupaten perlu mempertimbangkan aspek-aspek internal desa mitra yang signifikan memengaruhi keberhasilan pendampingan desa mitra, seperti keterbukaan masyarakat desa terhadap hal-hal baru dan inovatif, kepemimpinan kepala desa, serta motivasi dan semangat para

aparatus desa terhadap perubahan dan kemajuan. Perlu diakui oleh semua pihak bahwa penting untuk mendapatkan bukti keberhasilan dari pelaksanaan UMD-KKN Tematik agar menimbulkan rasa percaya bahwa inisiatif ini penting untuk dilakukan. Penting untuk menghindari pelaksanaan UMD-KKN Tematik di desa-desa yang belum siap berkomitmen karena berisiko terjadi pemborosan sumber daya yang tersedia tanpa menghasilkan hasil (*output*) dan dampak yang baik.

- Sinkronisasi *roadmap* pendampingan desa mitra dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Daerah (RPJMD) Kabupaten merupakan titik penting pelaksanaan UMD-KKN Tematik sebagai sebuah perubahan. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi yang setara para pihak yang terlibat.
- Sinkronisasi tiga jenis perencanaan di atas menjadi dasar bagi terciptanya platform kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten serta menjadi dasar bagi perencanaan alokasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan UMD-KKN Tematik dari tiga pihak, yaitu perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

### **Kotak Praktik Baik 1. Perubahan Cara Berinteraksi, Memulai Sinergi**

Pengalaman Universitas Mataram (UNRAM) melaksanakan UMD-KKN Tematik dimulai pada tahun 2019. Berbeda dengan pelaksanaan pola KKN Tematik dan pola KKN lainnya, dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini, UNRAM bekerja sama dengan pemerintah daerah. UNRAM menyadari bahwa pemerintah memerlukan dukungan universitas dalam pencapaian target target pembangunan sesuai visi misi yang ada dan model UMD-KKN tematik menjadi salah satu alternatif untuk mendukung program strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

UMD-KKN Tematik Adminduk diawali oleh peran pihak ketiga, yaitu KOMPAK yang mengubah cara kerja dan cara interaksi antara UNRAM dan pemerintah kabupaten. Sinergi multipihak menjadi sebuah perubahan yang diterima baik oleh semua pihak dan menjadi cara kerja baru. Fasilitasi KOMPAK dengan menjembatani interaksi ini bersifat sementara, sehingga setiap perguruan tinggi yang hendak mengadopsi model UMD-KKN Tematik perlu mempersiapkan strategi komunikasi dan interaksi dengan pemerintah daerah secara mandiri.

## 2. Target Perubahan yang Ditetapkan Oleh Masing-Masing Universitas

Perubahan hanya dapat dipastikan terjadi bila ada pengukuran *output* yang jelas. Hal ini yang menjadikan UMD-KKN Tematik berbeda dengan pola KKN konvensional atau KKN Tematik yang lainnya. Perguruan tinggi yang hendak mengadopsi model UMD-KKN Tematik harus menentukan terlebih dahulu *output* yang hendak dicapai serta melakukan pengukuran terhadap capaian *output* tersebut. Pengukuran terhadap capaian *output* harus disesuaikan dengan target perubahan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa cara untuk menetapkan target perubahan. Salah satunya adalah dengan menggunakan konsep *Theory of Change*.

Menurut *Center of Theory of Change*,

*'Theory of Change is essentially a comprehensive description and illustration of how and why a desired change is expected to happen in a particular context'*<sup>1</sup>

*Theory of change* adalah sebuah deskripsi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa sebuah perubahan yang diinginkan dalam sebuah konteks atau lingkungan tertentu dapat terjadi. Perguruan tinggi yang hendak menerapkan model UMD-KKN Tematik dapat menetapkan *output* dengan menggunakan analisis '*Theory of Change*'. UMD-KKN Tematik merupakan model KKN yang mengutamakan kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa, maka analisis *Theory of Change* harus melibatkan dua aktor tersebut. Supaya analisis dapat digunakan dengan efektif, perguruan tinggi perlu mengambil peran utama untuk memahami *Theory of Change* dengan baik terlebih dahulu dan kemudian mengajak pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bersama-sama menggunakan *Theory of Change* dan menetapkan perubahan yang diinginkan. Sehingga sebelum pelaksanaan UMD ada baiknya perguruan tinggi meningkatkan keahlian menganalisis dalam *Theory of Change*.

Dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik, *Theory of Change* seharusnya terwujud dalam *roadmap* pendampingan desa mitra UMD-KKN Tematik yang sudah disinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten maupun RPJM Desa.

---

<sup>1</sup> Keterangan lebih lanjut tentang bagaimana *theory of change* dilakukan dapat ditemukan di <https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/>



## Kotak Rekomendasi 2. Referensi Metode/Alat Penentuan Perubahan

- *Theory of Change* terwujud dalam *roadmap* UMD-KKN Tematik perguruan tinggi.
- *Roadmap* disusun berdasarkan identifikasi dua aspek yaitu aspek keahlian bidang ilmu yang tercermin dari berbagai hasil riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi, dan aspek potensi-potensi desa.
- Penetapan *roadmap* dilakukan melalui proses kolaboratif dengan desa mitra
- *Roadmap* secara berkelanjutan juga menjadi catatan kekuatan dan kelemahan baik perguruan tinggi maupun desa.
- *Roadmap* dapat menjadi dasar pemetaan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun desa sehingga meminimalisasi kesalahan dalam penentuan lokasi UMD-KKN Tematik.

### a. Target Perubahan yang Disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Permasalahan Pembangunan Desa Mitra

Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan utama model UMD-KKN Tematik adalah keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan di desa, maka target perubahan UMD-KKN Tematik harus sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan desa dan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah sebagai lokus pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah tercermin dalam RPJMD. Selanjutnya prioritas pembangunan di tingkat desa tercermin dalam RPJM Desa. Dua jenis rencana pembangunan jangka menengah tersebut sudah harus disinkronkan dengan *roadmap* pendampingan desa mitra oleh perguruan tinggi.

### b. Merencanakan Perubahan

Tersedia berbagai alat analisis untuk merencanakan perubahan yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari UMD-KKN Tematik. Beberapa alat analisis tersedia secara gratis di berbagai *website*. Sebagai contoh, penggunaan *business model canvas* dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa. Selain *business model canvas*, tersedia perangkat lain seperti *design thinking* yang dapat digunakan sebagai metode untuk memecahkan masalah atau mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi serta upaya-upaya menghasilkan inovasi terhadap praktik-praktik yang telah berjalan.

### Kotak Referensi 1. Metode/Alat Penentuan Perubahan

Selain *Theory of Change*, terdapat metode/alat yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan. Perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan harus terlebih dahulu menguasai beberapa alternatif metode/alat tersebut. Berikut referensi metode/alat penentu perubahan yang dapat digunakan.

- <https://www.theoryofchange.org/library/toc-examples/>

*Website* ini berisi berbagai contoh penggunaan *Theory of Change* untuk menentukan perubahan (hasil dan dampak) diberbagai program. Tersedia juga *software Theory of Change* yang dapat digunakan secara daring tanpa perlu mendownload *software*-nya (<http://www.theoryofchange.org/toco-software/#6>)

- <https://diytoolkit.org/>

*Website* ini berisi alat-alat praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi sosial). Terdapat berbagai pilihan tools. Misalnya untuk menyusun rencana yang jelas, seperti *SWOT analysis* (<https://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/>), *Business Model Canvas* (<https://diytoolkit.org/tools/business-model-canvas/>), *Building Partnership Maps* (<https://diytoolkit.org/tools/building-partnerships-map-2/>) dan *Learning Loop* (<https://diytoolkit.org/tools/learning-loop/>).

- <https://bmtool.net/tools/>

*Website* yang berisi berbagai alat praktis untuk mendesain model-model usaha

## 3. Aspek GESI dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Model UMD-KKN Tematik

Salah satu komponen penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyusunan target perubahan adalah aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial<sup>2</sup>/*Gender and Social Inclusion* (GESI). Sudah diakui secara luas, pengarusutamaan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam program pembangunan, di semua tingkatan, termasuk di desa, merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan di berbagai bidang pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

<sup>2</sup> Prinsip GESI menekankan dua hal utama, yaitu 1) persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan 2) inklusi sosial sebagai upaya untuk mewujudkan partisipasi utuh dalam proses sosial, politik individu, dan kelompok sosial tertentu di masyarakat (Department of Economic and Social Affairs. 2010. *Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context*. New York: United Nations Publication).

Menyadari pentingnya pengarusutamaan GESI dalam UMD-KKN Tematik, penyusunan *roadmap* pendampingan desa mitra oleh perguruan tinggi perlu dilakukan setelah melakukan analisis GESI. Analisis ini meliputi penelaahan terhadap relasi laki-laki dan perempuan di dalam komunitas, kebutuhan dan masalah yang dihadapi, serta dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dari pembangunan desa. Langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaan UMD-KKN Tematik yang sensitif gender dan inklusif secara konsisten dan sistematis mengupayakan dan memberikan perhatian terhadap pelibatan kelompok masyarakat miskin dan rentan. Upaya ini dilakukan agar manfaat UMD-KKN Tematik juga dapat dinikmati oleh kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, penganut kepercayaan, serta kelompok rentan lain<sup>3</sup> yang selama ini terpinggirkan dan tidak terjangkau oleh berbagai program pembangunan di desa.

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik yang inklusif di tingkat pelaksanaan program di desa dapat diterjemahkan dengan keterbukaan akses atau tidak ada hambatan yang berarti bagi anggota masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari kegiatan program. Perlu disadari bahwa terwujudnya pelaksanaan program yang inklusif merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan berbagai program pembangunan secara universal, di mana komitmen dan upaya bertahap serta berkesinambungan diperlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan intervensi jangka pendek.

Berikut adalah beberapa langkah utama yang diperlukan untuk mewujudkan pendekatan yang sensitif gender dan inklusi sosial:

**1) Meningkatkan kesadaran berbagai pihak** (mahasiswa, manajemen program, pemerintah desa dan kabupaten, masyarakat desa) mengenai keberadaan anggota masyarakat yang rentan, serta masalah dan isu-isu spesifik yang dihadapi dalam konteks pembangunan desa dan program yang didorong melalui UMD-KKN Tematik.

Langkah ini perlu diawali dengan upaya identifikasi terhadap kelompok masyarakat apa saja di desa yang memiliki kerentanan dan membutuhkan bantuan untuk dapat berpartisipasi serta menikmati manfaat program.

---

<sup>3</sup> Berbagai data program dan hasil kajian menunjukkan bahwa umumnya kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang dianggap rentan karena sering kali terlewatkan dan tidak terjangkau dalam proses pembangunan di desa. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa kelompok rentan di setiap wilayah bisa berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial budaya, dan politik di wilayah tersebut, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk disadari dan menggarisbawahi pentingnya penggunaan data dalam mengidentifikasi kelompok rentan di suatu wilayah

**2) Mengupayakan keterlibatan dan partisipasi kelompok rentan** dalam semua kegiatan dan tahapan program yang didorong oleh pendekatan UMD-KKN Tematik. Pemikiran yang harus selalu menjadi dasar upaya ini adalah kelompok rentan itu sendiri yang memahami kebutuhan dan hambatan yang mereka alami. Penting juga untuk memastikan upaya pelibatan ini hampir selalu memerlukan upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan secara sistematis dan berkesinambungan.

**3) Memastikan aksesibilitas yang menyeluruh** dalam mengembangkan intervensi, membangun fasilitas, dan menyediakan layanan melalui program yang didorong oleh pendekatan UMD-KKN Tematik.

Untuk mewujudkan aksesibilitas yang menyeluruh, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan dari berbagai aspek yang biasanya dihadapi kelompok rentan untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari program pembangunan di desa, yang akan mencakup:

**a) Aksesibilitas Fisik<sup>4</sup>**

Hambatan yang biasanya ditemui terkait dengan aksesibilitas fisik adalah yang terkait dengan faktor jarak, kondisi fisik bangunan dan fasilitas, serta keberadaan alat bantu dan fasilitas penunjang. Aksesibilitas fisik ini sering kali sangat berhubungan dengan fasilitas umum publik seperti jalan desa atau kondisi bangunan balai desa sebagai tempat pertemuan. Upaya untuk mewujudkan aksesibilitas ini tentunya memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berwenang.

**b) Aksesibilitas Ekonomi dan Sosial**

Aspek ini meliputi upaya untuk mengatasi hambatan finansial. Salah satunya adalah prosedur operasional program yang rumit dan sulit dipahami atau diikuti, khususnya oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Tercakup di dalam aksesibilitas sosial adalah aspek yang berhubungan dengan prosedur yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses program, seperti misalnya mengundang kelompok perempuan untuk mengikuti pertemuan di tempat yang biasanya hanya dikunjungi oleh kelompok laki-laki di desa. Intervensi dalam aspek komunikasi dan sosialisasi program, seperti penggunaan bahasa lokal, istilah yang sederhana dan

---

<sup>4</sup> Pembangunan fasilitas fisik yang inklusif dapat merujuk pada model desain universal/inklusif seperti yang dijelaskan dalam sumber berikut: <http://access.ecs.soton.ac.uk/blog/training/universal-design/>

mudah dipahami, serta penggunaan media sosialisasi yang beragam seperti suara, gambar, dan bahasa isyarat juga merupakan salah satu contoh upaya untuk meningkatkan aksesibilitas sosial dalam program dan kegiatan.

### **c) Menggunakan Pendekatan Paralel Pengarusutamaan dan Intervensi Khusus**

Pendekatan ini menekankan pada upaya-upaya untuk melibatkan kelompok masyarakat rentan dalam semua kegiatan dan intervensi yang dilakukan untuk kelompok masyarakat umum (pengarusutamaan). Bersamaan dengan itu, juga menyediakan dukungan spesifik yang dibutuhkan agar kelompok masyarakat rentan yang memiliki kebutuhan khusus bisa berpartisipasi sepenuhnya (intervensi khusus). Salah satu bentuk upaya pengarusutamaan GESI yang krusial adalah penyediaan data terpilah (misalnya berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas, usia, dan aspek lain yang relevan) dalam memantau pelaksanaan dan hasil program/kegiatan.

Untuk mewujudkan pendekatan UMD-KKN Tematik yang sensitif gender dan inklusif, tentunya diperlukan sistem dan manajemen tim yang juga mengusung nilai dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial. Hal ini secara praktik diterjemahkan dengan kesempatan yang setara bagi anggota tim manajemen dan mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam program sesuai peran dan kompetensinya, serta kesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pendekatan UMD-KKN Tematik yang diikuti.

Lebih lanjut tentang pelaksanaan model UMD-KKN Tematik berbasis Gender bisa diakses pada buku Panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Inovatif UIN Ar-Raniry (lihat: Langkah-langkah Jalur Analisis Gender untuk Desain Program di [https://kompak.or.id/id/download/52/UMD\\_Ar\\_Raniry\\_0104.pdf](https://kompak.or.id/id/download/52/UMD_Ar_Raniry_0104.pdf))



*Pendataan persyaratan pengurusan dokumen adminduk oleh mahasiswa Unram dalam pelayanan keliling oleh Dukcapil KLU di Desa Malaka (Dok. Unram)*

## B. Dampak yang diharapkan

Pengukuran dampak penting untuk dilakukan. Perguruan tinggi dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mengukur dampak dari pelaksanaan model UMD-KKN Tematik ini. Pelibatan multipihak diperlukan untuk melaksanakan pengukuran dampak, sebagai contoh, dinas-dinas pemerintah daerah, bahkan desa yang terlibat dalam kegiatan. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai bahan untuk perbaikan serta advokasi untuk memperluas dukungan dari berbagai pihak.

Pelaksanaan model UMD-KKN Tematik sebagai model pengabdian masyarakat yang kolaboratif sebagai sebuah perubahan menghasilkan dampak yang bersifat multiaspek, yaitu:

### 1. Dampak pada Perguruan Tinggi

Dampak UMD-KKN Tematik pada perguruan tinggi dapat dipetakan pada tiga aktor berikut:

#### a. Individual: Dosen dan Mahasiswa

Pada tingkat individual, dampak UMD-KKN Tematik dirasakan mahasiswa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan UMD dan dosen yang berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Melalui keikutsertaan dalam UMD-KKN Tematik, maka mahasiswa diharapkan dapat menjadi '*agent of change*' atau agen perubahan. Mereka dapat melatih keterampilan dan mendapatkan pengalaman berkontribusi terhadap pemecahan masalah pembangunan (baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah) secara nyata dengan ukuran-ukuran capaian yang jelas.

Keterlibatan mahasiswa dalam program diharapkan akan meningkatkan keterpaparan mahasiswa terhadap isu-isu nyata di masyarakat. Keterpaparan ini akan memperkaya pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengembangkan solusi bagi masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan gender, dan eksklusi sosial yang ada di tengah masyarakat.

Hal ini merupakan konsekuensi yang baik ketika perguruan tinggi dapat memformulasikan *Theory of Change* pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Selain itu juga memberikan hasil yang positif dari penyelarasan tujuan pelaksanaan UMD-KKN Tematik dengan prioritas permasalahan pembangunan daerah.

Merujuk pada pendekatan yang juga sensitif GESI, diharapkan upaya-upaya untuk mendorong kesetaraan gender dapat dilakukan sejak tahap rekrutmen mahasiswa di

mana kesempatan yang sama diberikan kepada para kandidat mahasiswa sesuai dengan minat dan potensinya.

DPL diharapkan juga merasakan manfaat positif dari pelaksanaan UMD-KKN Tematik. DPL akan mendapatkan eksposur permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah desa. Eksposur ini menjadi pendorong berpikir kritis dan analitis bagi para DPL untuk mendapatkan solusi dari permasalahan nyata tersebut. Hasilnya adalah ide-ide praktis yang dapat dilaksanakan dalam dharma perguruan tinggi yang lain, yaitu dharma penelitian dan dharma pengajaran. Selain dua hal tersebut, muncul dampak yang tak terlihat yang dirasakan oleh DPL, yaitu kebahagiaan yang didapatkan dengan berada di tengah masyarakat, bukan di menara gading perguruan tinggi.

### **Kotak Testimoni 1. Dampak Bagi Mahasiswa, Pembelajaran, dan Pengalaman**

“Dengan KKN ini saya jadi lebih mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya, bisa terjun langsung ke lapangan dan berkomunikasi dengan lebih transparan sehingga mengetahui apa yang mereka butuhkan.”

#### **Pengalaman Menjadi Warga Desa**

“Sepulang kita dari tempat pengambilan data, tepatnya dibawah kaki gunung. Kita seluruh tim \*\*\*\*\*, kehujanan, basah kuyup, sandal/sepatu kita kotor karena terkena lumpur. Lalu, mau hampir sampai dirumah tiba-tiba listrik mati. Jadi, kita harus berjalan dengan kondisi seperti yang saya jelaskan sebelumnya dengan lampu dari *cellphones*.

Dengan adanya kegiatan KKN ini, saya pribadi merasa lebih baik setelah kegiatan KKN berlangsung. Selama KKN saya mengerti bagaimana masyarakat sekitar mengisi waktunya setiap saat walau dengan sederhana. Pengalaman hidup saya pun menjadi lebih bertambah dan mengerti akan arti hidup dengan sederhana.”

#### **Pembelajaran Hidup**

“Pengalaman menarik saya temui pada saat saya berjumpa dengan pemilik rumah, dan ternyata rumah yang saya tempati sangat jauh sekali tempatnya dan untuk mencari data kependudukan harus menempuh jalan berkilo-kilo meter, hal tersebut sangat menarik dan tidak dapat saya lupakan karena jika saya tetap tinggal di Bandung dan tidak mengikuti kegiatan KKN maka pengalaman tersebut tidak dapat saya temui.”

#### **Time Management**

“Pengalaman saya selama KKN UMD ini sangat menarik bagi diri saya sendiri. Dalam kondisi serba keterbatasan seperti tidak punya kendaraan sendiri, jumlah anggota yang hanya enam



orang, serta kuliah yang masih saya tempuh mewajibkan saya harus pulang pergi Bondowoso-Jember setiap Senin sampai Jumat. Tapi karena tanggung jawab KKN, saya tidak pernah dengan sengaja bermalam di Jember walau seletih apapun. Karena di malam hari, di desa yang saya dan kelompok saya tanggung, harus mendapatkan ekstra strategi dan eksekusi. Walau di pagi atau siang hari kadang tidak bisa melaksanakan program kerja, tapi di malam hari ketika tidak kuliah, program kerja harus terlaksana. Kemudian, masih ada tanggungan untuk mencari dana tambahan dari pengadaan donasi Rumah Kreatif, yang sekiranya tidak mungkin cukup untuk pengembangan potensi desa. Terlepas dari itu semua, saya secara pribadi sangat bangga dan senang dapat menjadi bagian dari KKN UMD ini. Selama pelaksanaan program kerja, yang ada dalam benak saya adalah bagaimana pun juga kegiatan ini harus bermanfaat dan memberi kontribusi bagi semua masyarakat Desa Bulu. Baik anak-anak, remaja, atau orang tua, kami sangat berharap mereka dapat menikmati hasil kerja program-program kami. Alhamdulillah, kami berhasil menggerakkan kreativitas masyarakat mulai dari yang belum sekolah hingga yang sudah punya anak cucu. Terima kasih KOMPAK, terima kasih semuanya.”

### **Antusiasme Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah**

“Antusiasme warga Desa A cukup tinggi, di luar perkiraan yang memandang warga desa minim pengetahuan mengenai teknologi informasi. Ternyata saat diajarkan mengenai *website* desa, warga desa cukup paham dengan apa yang diajarkan.

Pengalaman yang sangat menarik yaitu saat melakukan pengenalan program kepada masyarakat. Di situ kita melihat antusiasme serta begitu besar keinginan dari masyarakat untuk mengembangkan desanya. Di sisi lain, dukungan dari perangkat desa sangat mendukung jalannya program ini.”

### **Saling Memahami**

“Saya mendapat banyak pengalaman dari kegiatan KKN ini. Saya belajar untuk saling memahami satu sama lain, bekerja sama, menghormati warga desa, serta mempraktikkan ilmu yang saya miliki. Melalui kegiatan ini, saya bisa membantu adik-adik yang masih bersekolah dalam bidang Bahasa Inggris dan menggerakkan kelompok tari. Bagian paling menariknya adalah kami menjadi dekat dan saling menyayangi satu sama lain. “

### **Mendapatkan Kawan Baru dan Perspektif Baru**

“Ketika bertemu dengan teman-teman baru yang berbeda latar belakang fakultas menjadi sebuah tantangan yang sangat menarik. Dari sana saya bisa belajar memahami sudut pandang dan karakter masing-masing anak agar nantinya bisa tercipta kerja sama tim yang baik. Pengalaman menarik selanjutnya, ketika jadwal kegiatan yang disetujui dengan kepala desa bersamaan dengan kegiatan perkuliahan, dan memaksa mahasiswa harus kembali ke desa pada hari itu juga, otomatis kejar-kejaran sama waktu dan truk bis yang ada di jalan, itu pengalaman menarik pengalaman seru serasa naik *roller coaster*.”

### **Memberi dan Menerima Motivasi**

“Yang menarik adalah ketika saya harus menjadi ketua yang lebih aktif memberi motivasi, dan rasa optimis kepada kawan-kawan juga kepada ibu-ibu tapi saya juga merasa perlu untuk disemangati karena kondisi disana jauh dari yang saya bayangkan. Kendala lain, saya lagi saya agak kurang bisa berbahasa lokal.”

### **Latar Belakang Keilmuan yang Berbeda Untuk Tema UMD-KKN Tematik**

“Pengalaman menarik yang saya dapatkan di lokasi KKN adalah tidak berhubungannya disiplin ilmu yang saya dapatkan dalam lokasi dengan yang saya dapatkan di fakultas, sehingga saya merasa lucu karena di lokasi KKN yang saya dapatkan termasuk lokasi KKN yang Tematik yang berhubungan dengan kesehatan.

Saat menjelaskan kepada masyarakat tentang imunisasi dan nifas lantas saya sendiri tidak paham dengan hal itu, haha.. *padodongi*.

Saya cowok dan disuruh jelaskan tata cara periksa, sangat menantang!”

### **Bermanfaat Untuk Diri Sendiri dan Sesama**

“Penerjunan mahasiswa di masyarakat memberikan banyak pengalaman yang bermanfaat seperti menumbuhkan kepekaan, kepedulian, rasa percaya diri, solidaritas. Meskipun disiplin ilmu yang kami peroleh dari bangku kuliah itu berbeda-beda, justru perbedaan itu yang menghasilkan inovasi dan implementasi yang saling melengkapi satu sama lain. Kami dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa dengan inovasi yang modern dan prosedur yang lebih efisien. Kami akan selalu mempromosikan serta mengedukasi adik angkatan kami bahwa dalam pengabdian masyarakat khususnya KKN itu merupakan potensi dan aset bangsa yang tertidur yang harus dimanfaatkan dalam upaya membangun desa. serta kolaborasi yang baik antara mahasiswa, pemerintah dan masyarakat akan memunculkan mutiara tersembunyi yang dimiliki oleh desa.

Kami tersentuh sejak KOMPAK memberikan pembekalan tentang Admindak bagi kelompok rentan. Oleh sebab itu kami berusaha membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Meskipun sulit dan membutuhkan waktu, akhirnya mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Kami senang. Rasanya seperti saya sendiri yang dapat.”

**Kotak Testimoni 2. Universitas Megarezky, Menjalin Ikatan Kembali ke Desa**

“Pelaksanaan UMD-KKN Tematik oleh Universitas Megarezky menghasilkan beberapa dampak yaitu, kegiatan KKN kami menjadi lebih terarah. Meski begitu, masih ada desa-desa yang meminta dilakukan kegiatan diluar tema yang telah disepakati. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk penyelenggaraan UMD-KKN Termatik berikutnya sehingga dapat lebih berkoordinasi dengan desa-desa mitra. Selain itu, mahasiswa juga merasakan banyak pembelajaran dan pengalaman. Mahasiswa Universitas Megarezky KKN konvensional biasanya tidak diperhatikan keberadaannya oleh kepala desa dan aparat desa. Namun, sejak mahasiswa Universitas Megarezky melaksanakan UMD-KKN Tematik mereka diperhatikan oleh kepala desa dan perangkat desa. Mahasiswa belajar bahwa mengubah perilaku masyarakat adalah hal yang sulit. Namun demikian banyak mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik yang setelah selesai kegiatan masih kembali ke desa-desa mitra untuk melaksanakan penelitian. Selain untuk keperluan penelitian, mahasiswa menjadi memiliki ikatan emosional dengan warga di desa mitra.”

**b. Institusional (Lembaga) Perguruan Tinggi**

Pada tingkat lembaga, dampak yang muncul dengan pelaksanaan UMD adalah perubahan persepsi dari pemerintah daerah dan masyarakat terhadap perguruan tinggi dan pelaksanaan KKN. Selama ini KKN dari berbagai perguruan tinggi dipandang tidak penting dan bahkan dianggap membebani pemerintah daerah dan masyarakat desa. Namun dengan pelaksanaan UMD-KKN Tematik, persepsi negatif terhadap perguruan tinggi dan pelaksanaan KKN berubah menjadi lebih positif. Pada lokasi kegiatan pelaksanaan, desa yang dulu apatis terhadap kegiatan KKN karena kurang atau tidak jelas tujuannya, kini secara aktif berdiskusi dengan perguruan tinggi untuk mendesain bersama kegiatan KKN Tematik dan bahkan mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan UMD-KKN Tematik. Desa-desa diluar lokasi kegiatan UMD-KKN Tematik bahkan menghubungi perguruan tinggi agar kegiatan UMD-KKN Tematik dilaksanakan di desa mereka.

## 2. Dampak pada Pemerintah Daerah

UMD-KKN Tematik diharapkan berdampak positif pada pemerintah kabupaten. Beberapa hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau melaksanakan pembangunan dapat dipecahkan melalui UMD-KKN Tematik.

UMD-KKN Tematik berkontribusi terhadap capaian program kerja prioritas pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan UMD, pemerintah daerah dapat berbagi peran kepada perguruan tinggi. Seperti halnya pasar yang mempertemukan antara suplai barang dengan kebutuhan, UMD-KKN Tematik memfasilitasi bertemunya suplai sumber daya manusia yang melimpah di ribuan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan pemerintah daerah akan sumber daya manusia untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Dengan demikian, permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dapat terpecahkan.

Selain itu, kerja pemerintah daerah sering kali terhambat karena permasalahan kurangnya keterbukaan dari internal birokrasi pemerintah daerah. Melalui UMD-KKN Tematik, pemerintah daerah mau tidak mau berubah secara positif dan membuka diri terhadap keberadaan aktor-aktor lain yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan di daerah tersebut. Jika selama ini, kerja sama dan kolaborasi hanya merupakan wacana yang sulit dipraktikkan, UMD-KKN Tematik merupakan wujud nyata kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan pembangunan.

Kerja sama dan kolaborasi dalam UMD-KKN Tematik tidak hanya berhenti pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Understanding* atau MoU), namun berlanjut pada aktivitas nyata yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pembangunan sesuai prioritas pembangunan daerah sedangkan perguruan tinggi melakukan identifikasi bidang ilmu pengetahuan dan bidang keahlian yang dapat dikontribusikan kepada pemerintah daerah. Identifikasi bidang ilmu pengetahuan dan bidang keahlian tersebut akan tergambar pada *roadmap* yang telah disebutkan pada bagian Target Perubahan.

Permasalahan umum ditemukan pada birokrasi pemerintah daerah adalah sulitnya bagian-bagian di badan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi karena karakter birokrasi yang bersifat departementalisasi. UMD-KKN Tematik memudahkan sinkronisasi tersebut, karena penyelenggaraannya menuntut komunikasi yang baik dan intensif antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan antar bagian dalam pemerintah daerah.

### 3. Dampak bagi Desa

Dampak perubahan awal juga mulai terlihat di tingkatan individu masyarakat di desa. UMD-KKN Tematik Adminduk Unram memfasilitasi individu dengan disabilitas dan para lansia untuk bisa mengakses layanan dan mendapatkan dokumen kependudukan dengan lebih cepat, yang juga memudahkan mereka untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Selain itu, pendampingan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan kaum perempuan di lokasi UMD-KKN Tematik di Aceh Barat juga telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga. Bukti-bukti dari dampak UMD-KKN Tematik menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat menjadi solusi bagi persoalan konkrit yang dihadapi masyarakat dalam keseharian mereka.

#### Kotak Testimoni 3. Pemerintah Daerah dan Dampak

Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, pelaksanaan UMD-KKN Tematik telah menghasilkan beberapa dampak seperti, membangun tradisi kerja kolaboratif, kemudian perguruan tinggi ikut berbenah dengan berupaya mengubah pola pembelajaran dan materi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang selama ini di masyarakat sering lebih cepat dari dunia kampus. Selain itu, tradisi kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi semakin baik dengan mengoptimalkan sinergi dengan mitra, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi.

Model ini mendorong Pemda mengeluarkan Surat Keputusan Tim Teknis Pelaksanaan UMD melalui KKN Tematik. Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) maupun Dinas Kesehatan (Dinkes), saat ini sudah berada dalam di tim yang sudah mendapat Surat Keputusan tersebut guna mengawal UMD.

Harapannya, UMD-KKN Tematik dapat lebih membantu dalam ketersediaan data dan potensi desa, pertumbuhan ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan, tingkat partisipasi masyarakat, angka pengangguran, serta tingkat kemiskinan.

Untuk mereplikasi UMD-KKN Tematik, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan antara lain di tahun 2020 memperluas pendekatan UMD dengan menggandeng perusahaan rintisan atau *startup* (saat ini tiga desa sudah MOU dengan Tokopedia). Kemudian untuk bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kami melibatkan dosen perguruan tinggi dalam mendukung hasil KKN Tematik. Kami juga membantu agar perguruan tinggi bisa bekerja sama langsung dengan desa. Mendorong lahirnya surat edaran pimpinan daerah desa yang mengarahkan agar semua desa menyiapkan anggaran khusus untuk tema UMD dan saat ini sedang dicarikan nomenklatur penganggarnya. Terakhir, kami menginisiasi untuk membentuk 'Desa Mart Berbasis Digital'.

***-DR. Abdul Gaffar, S.T., M.Si., Kepala Bappeda Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Inisiator dalam meluaskan model UMD di Kabupaten Pangkep-***

#### **Kotak Testimoni 4. Pemerintah Desa dan Dampak**

"Kami sangat berterima kasih kepada KOMPAK, KKN Admindak Unram, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Mau jauh-jauh mengurus kami, anak-anak kami, dengan membantu menguruskan dokumen penduduk, juga kartu untuk anak kami (akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak/KIA), dan tanpa membayar apa pun. Padahal ke sininya kan susah, harus jalan kaki karena jalanan pada rusak, rupanya tahu bahwa kami miskin dan tidak tahu yang begini-begini. Sekarang kami jadi tahu pentingnya, tahu cara mengurusnya. Biasanya kami hanya di kebun saja."

**- Bapak Rus, warga Dusun Pademare di Desa Sambik Ellen, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat-**

"KKN oleh Unej telah menggerakkan aset dan kearifan lokal untuk membangun desa Bulu Cindea melalui kolaborasi, perencanaan yang baik dan profesional, meski dilakukan dalam waktu singkat."

**- Made Ali, Kepala Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan-**

"Manfaat yang dirasakan desa dengan adanya mahasiswa UMD-KKN Tematik adalah sistem pelayanan administrasi di kantor desa semakin jelas dan teratur yang dirasakan oleh masyarakat. Semangat kebersamaan antar aparat desa, lembaga desa dan masyarakat semakin erat karena seringnya ada kegiatan pertemuan, diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa, realisasi penggunaan dana desa maksimal dan tepat waktu. Harapan saya agar kedepannya pihak kampus mengirimkan mahasiswa dari berbagai macam jurusan/keilmuan agar kami di desa bisa memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya desa, dari berbagai macam pengetahuan mahasiswa. Dengan banyaknya produk unggulan di desa kami, kiranya dicarikan pasaran agar produknya bisa bersaing di pasaran misalkan kerja sama dengan Tokopedia."

**- Muksin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan-**

"Manfaatnya sangat besar terutama pada wawasan dan pengetahuan yang masih minim diketahui oleh pemerintah desa seperti bagaimana caranya menggali dan mengembangkan potensi desa dan bagaimana caranya mengoperasikan Sistem Informasi Desa. Melalui KKN Tematik ini, kami jadi bisa mengembangkan potensi desa kami yaitu di bidang pariwisata,"

**- Sulaedi, Kepala Desa Glingseran, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur-**

## **Kotak Praktik Baik 2. Dampak UMD-KKN Tematik Adminduk bagi Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) merupakan sektor terdepan dalam hal data kependudukan. Pelaksanaan program-program pemerintah selalu menggunakan data yang dimiliki oleh Disdukcapil sebagai dasar penentuan masyarakat yang berhak menerima program. Namun, pelaksanaan program pemerintah terutama program-program yang sifatnya bantuan sosial atau *cash transfer* sering kali dinilai tidak tepat sasaran karena data-data yang bersumber dari Disdukcapil ternyata tidak mutakhir sehingga tidak lagi valid. Hal ini dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasca bencana gempa di tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan berbagai program untuk membantu masyarakat namun mengalami beberapa hambatan terutama karena masyarakat tidak memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk.

Selain bersumber pada data-data dari Disdukcapil, program-program bantuan sosial dari pemerintah juga bersumber dari Kabupaten Lombok Timur yang mendasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini, di mana 30-40% program-program pemerintah tidak tepat sasaran.

Meskipun selama tahun 2016-2018 Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur telah mencapai target nasional administrasi kependudukan yaitu 87%, namun persentase capaian berhenti di angka tersebut dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Rata-rata peningkatan yang diharapkan yaitu 1-2% sulit dicapai terutama karena hambatan utama, yaitu wilayah geografis yang menyebabkan penduduk Kabupaten Lombok Timur sulit melakukan mobilitas ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Sebaliknya, wilayah geografis tersebut juga menyulitkan para petugas pendataan menjangkau penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. UMD-KKN Tematik yang berfokus pada perbaikan administrasi kependudukan menghasilkan *output* yang sangat baik untuk administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Timur. Di tahun 2019, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur berhasil melampaui target nasional administrasi kependudukan yaitu sebesar 92%.

Dengan capaian administrasi kependudukan tersebut, Disdukcapil melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial. Pemutakhiran data-data kependudukan di Disdukcapil (data berbasis nama dan nomor induk kependudukan) ternyata dapat dimanfaatkan juga untuk pemutakhiran data-data DTKS.

Selain bermanfaat untuk Dinas Sosial, hasil UMD-KKN Tematik berupa pemutakhiran data-data administrasi kependudukan dapat dimanfaatkan oleh OPD yang lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, misalnya Bappeda yang dapat menggunakan data-data tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, atau Dinkes untuk melakukan verifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

UMD-KKN Tematik menjadi kunci bagi sinkronisasi data-data penting bagi pembangunan dan secara signifikan membantu tercapainya indikator kinerja kunci OPD, yaitu Disdukcapil dan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

### Kotak Rekomendasi 3. Menetapkan Dampak

- Setelah menetapkan tujuan dan target perubahan, langkah berikutnya dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik adalah menetapkan dampak yang diharapkan.
- Dengan mempertimbangkan bahwa UMD-KKN Tematik ini melibatkan dua pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah daerah kabupaten dan perguruan tinggi, maka penetapan dampak juga perlu dilakukan untuk kedua pemangku kepentingan.
- UMD-KKN Tematik harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan prinsip dasar utama yaitu bahwa mahasiswa sebagai pelaku utama UMD-KKN Tematik merupakan insan pembelajar dimana mahasiswa belajar untuk bekerja bersama dengan masyarakat dan pemerintahan desa untuk memajukan desa
- Sebagai insan pembelajar, mahasiswa akan menghadapi kondisi dimana mereka melakukan hal-hal yang tidak tepat sehingga diperlukan pendamping yaitu DPL.
- Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa UMD-KKN Tematik juga menjadi laboratorium bagi para mahasiswa untuk berinovasi. Sebagai laboratorium inovasi, UMD-KKN Tematik perlu menjadi ruang aman bagi ide-ide inovatif. Artinya melakukan kesalahan dalam berinovasi bukanlah hal yang buruk selama kesalahan tersebut merupakan bagian dari proses berinovasi untuk pembangunan desa.



*Kegiatan UMD-KKN Tematik mahasiswa Universitas Jember (Unej) di Desa Bulu Cindea, Pangkep, Sulawesi Selatan (Dok. Unej)*





*KKN Tematik Adminduk oleh mahasiswa Unram di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara (Dok. Unram)*

## C. Manajemen UMD

Dari berbagai pengalaman baik pelaksanaan UMD, terdapat banyak faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan manajemen dan pelaksanaan UMD, yaitu kepemimpinan, pelembagaan komitmen, pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan jejaring yang sudah ada, dan kejelasan target perubahan.

Untuk mewujudkan pendekatan UMD-KKN Tematik yang berpihak pada GESI, perlu disadari dan dipahami pentingnya memperhatikan dan mengusung nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam aspek-aspek manajemen yang dipaparkan di bawah ini:

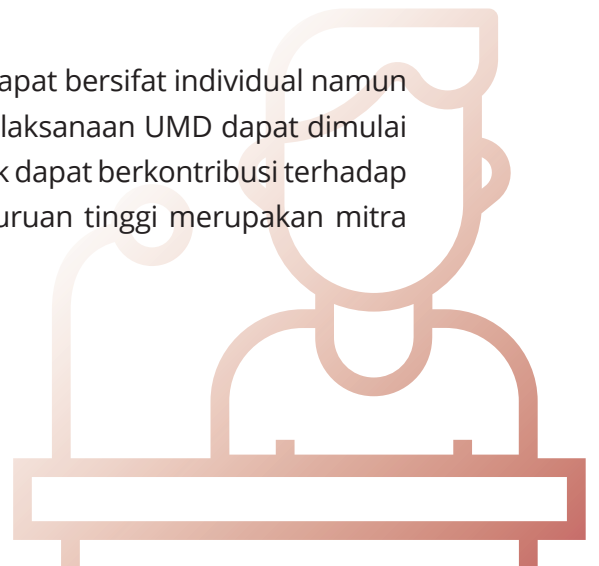
### 1. Kepemimpinan

Setiap perubahan memerlukan mesin yang mampu menggerakkan perubahan tersebut. Untuk memulai dan menggerakkan UMD-KKN Tematik diperlukan seseorang yang mengambil peran sebagai pemimpin (sering disebut sebagai *champion*) yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menggerakkan dan mengarahkan pihak-pihak yang bekerja untuknya maupun bekerja sama dengannya. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan. Bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan formal, namun mereka yang dianggap sebagai pemimpin karena memiliki kekuasaan-kekuasaan informal dapat juga menjadi ujung tombak pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

Adanya pemimpin atau *champion* yang memiliki komitmen akan menumbuhkan kepercayaan dari setiap anggota atau pemangku kepentingan lain untuk terlibat dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

Terdapat dua hal utama yang menjadi kunci sukses dalam setiap inisiatif pembangunan, termasuk UMD-KKN Tematik. **Pertama**, kepemimpinan yang akan menumbuhkan komitmen. **Kedua** adalah bukti/*evidence* bahwa perubahan tersebut menghasilkan dampak yang baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan. Strategi ini sering kali disebut dengan '*low hanging fruit strategy*'. Tumbuhnya kepercayaan merupakan modal untuk membangun komitmen yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik, kepemimpinan dapat bersifat individual namun dapat juga bersifat institusional. Hal ini berarti inisiasi pelaksanaan UMD dapat dimulai dari individu yang memahami besarnya potensi KKN untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan di daerah dan pemahaman bahwa perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



Hal penting lainnya dalam aspek kepemimpinan adalah memastikan individu dan institusi yang berperan sebagai pemimpin memahami isu GESI dan berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok rentan dalam kepentingan pembangunan desa. Penting untuk memastikan keputusan-keputusan yang diambil dalam pengembangan dan implementasi UMD-KKN Tematik memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan.

#### **Kotak Rekomendasi 4. Manajemen UMD, Pentingnya Aspek Kepemimpinan**

- Kepemimpinan yang mampu menginisiasi pelaksanaan UMD-KKN Tematik tidak harus selalu bersifat individual. Bila tidak ada satu pun pemimpin di tingkat lokal yang bersedia menjadi penggerak utama perubahan melalui UMD, maka diperlukan kepemimpinan yang bersifat institusional.
- Institusi atau lembaga yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten harus mengambil peran sebagai penggerak UMD-KKN Tematik.
- OPD yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah adalah sekretariat daerah (Setda) yang memiliki kewenangan utama menggerakkan seluruh birokrasi dan administrasi pemerintah daerah kabupaten.
- Selain Setda, OPD yang juga memiliki posisi strategis mengawal jalannya pembangunan di suatu wilayah kabupaten adalah Bappeda.
- Dengan mempertimbangkan bahwa UMD-KKN Tematik dilaksanakan dengan berfokus pada pembangunan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga dapat mengambil peran memimpin pelaksanaan UMD-KKN Tematik.
- Bagi perguruan tinggi, informasi mengenai OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dapat memainkan peran memimpin pelaksanaan UMD-KKN Tematik perlu untuk diperhatikan karena perguruan tinggi dapat juga melakukan pendekatan kepada salah satu OPD tersebut.
- Perguruan tinggi perlu memperhatikan kepemimpinan kepala desa yang menjadi desa mitra pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Kepala desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan di desanya, terbuka, dan mampu memotivasi serta mendorong aparat desa maupun warga desa untuk menjadi bagian dari perubahan yang diinisiasi oleh UMD-KKN Tematik akan menjadi modal bagi perguruan tinggi untuk meraih UMD-KKN Tematik yang berhasil dan berdampak.
- Perguruan tinggi dapat meminta komitmen dari kepala desa secara informal, namun komitmen dari kepala desa dalam bentuk formal seperti dokumen MoU dapat menjadi pilihan yang baik.

### **Kotak Praktik Baik 3. Manajemen UMD, Aspek Kepemimpinan di Kabupaten Pangkep**

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik di Kabupaten Pangkep diawali dengan inisiasi Dr. Abdul Gaffar S.T., M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep. Abdul Gaffar mengetahui mengenai pelaksanaan UMD-KKN Tematik oleh Universitas Jember (Unej) yang menghasilkan dampak positif yang luas, dan menindaklanjuti dengan mengundang Unej untuk melaksanakan Model UMD-KKN Tematik di Pangkep. Ajakan tersebut direspons positif oleh Unej melalui program KKN Universitas Membangun Desa (UMD) Universitas Jember Goes to Pangkep (9 Juli–21 Agustus 2019). Pelaksanaan UMD-KKN Tematik difokuskan di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan melibatkan lima belas mahasiswa KKN Unej dari berbagai disiplin ilmu serta Tim Dosen Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan UMD-KKN Tematik terdiri dari tiga bidang yaitu Pengembangan Layanan Informasi dan Administrasi Desa Berbasis TIK, Pengembangan Desa Wisata, dan Pengembangan Wirausaha Desa. UMD-KKN Tematik 'Unej Goes to Pangkep' selanjutnya menjadi *benchmark* atau contoh serta standar bagi pelaksanaan UMD-KKN Tematik di Kabupaten Pangkep yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Pangkep dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bagaimana inisiatif dari seorang individu pemimpin yang memiliki kekuasaan formal dapat memulai menggerakkan pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

## **2. Pelembagaan Komitmen: Lembaga, Anggaran dan Aturan**

Prasyarat penyelenggaraan UMD adalah komitmen dari pemerintah daerah (kabupaten), dan komitmen tersebut harus dilembagakan. Dalam pelaksanaan UMD, komitmen adalah modal utama yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Komitmen pemerintah daerah kabupaten dapat diwujudkan dalam tiga aspek, yaitu:

- lembaga (institusi),
- aturan, dan
- penyediaan anggaran.

Komitmen lembaga (institusi) diwujudkan dengan membentuk sebuah Tim Teknis sebagai Tim Pelaksana. Tim Teknis ini sedapat mungkin beranggotakan berbagai *stakeholder* baik yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten, tokoh masyarakat, maupun dari perguruan tinggi. Dengan adanya Tim Teknis tersebut, maka pelaksanaan UMD-KKN Tematik akan menjadi salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh pemerintah daerah kabupaten di bawah koordinasi OPD yang tepat.

Selain melalui pembentukan lembaga, mewujudkan komitmen pelaksanaan UMD-KKN Tematik dilakukan melalui pengalokasian anggaran yang reguler dan berkelanjutan. Aspek ini tentu tidak mudah. Tantangan utama dalam pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah adalah ketepatan waktu. Pemerintah daerah memiliki jadwal dan agenda penyusunan anggaran melalui pembahasan RPJMD yang khusus dalam periode tertentu yang tidak bisa diubah. Agar pelaksanaan UMD-KKN Tematik mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal. Untuk itu, rencana pelaksanaan UMD-KKN Tematik berupa *roadmap* UMD-KKN Tematik sudah harus diusulkan oleh perguruan tinggi dalam pembahasan RPJMD agar dapat dialokasikan pendanaan dalam APBD. Penentuan waktu yang tepat menjadi hal yang mendesak.

Komitmen pelaksanaan UMD-KKN Tematik dalam bentuk lembaga dan anggaran tersebut perlu diberi perlindungan yang bersifat legal dan formal dalam bentuk aturan sebagai payung hukum. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan UMD-KKN Tematik, SK Bupati dapat menjadi alternatif peraturan.

Pada aspek ini, penerapan prinsip GESI penting untuk dilakukan dalam memastikan upaya-upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendekatan ini terlembagakan. Memastikan intervensi-intervensi khusus yang didesain untuk menjangkau atau membantu kelompok rentan dilakukan secara sistematis, dan tidak dilaksanakan secara sporadis atau dengan satu kali intervensi saja. Aturan dan anggaran juga disediakan untuk mengakomodasi intervensi ini. Misalnya, mekanisme perwakilan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas diberlakukan dalam diskusi-diskusi yang dilakukan antara perguruan tinggi bersama desa. Mekanisme ini perlu ditetapkan dalam kesepakatan dan petunjuk operasional bersama. Hal ini juga berarti pelaksanaan pertemuan-pertemuan perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini dari segi jarak, waktu, dan aksesibilitas tempat pertemuan, serta mengalokasikan anggaran, atau mengupayakan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan perwakilan kelompok rentan untuk bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

### **Kotak Rekomendasi 5. Pelembagaan Komitmen**

- Pembentukan tim pelaksana atau tim teknis perlu dibarengi dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab.
- Bagi pemerintah daerah, pembentukan tim teknis merupakan cara untuk memastikan bahwa akan selalu tersedia dukungan sumber daya dan merupakan legitimasi terhadap UMD-KKN Tematik sehingga menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*).
- Perwakilan pemerintahan daerah dalam tim teknis merupakan perwakilan dari berbagai OPD di pemerintah daerah.

#### **Kotak Praktik Baik 4. Pelembagaan Komitmen, Pembentukan Tim Teknis UMD di Kabupaten Pangkep**

Dalam mewujudkan komitmen dalam bentuk lembaga, Kabupaten Pangkep membentuk Tim Teknis UMD. Tugas utama Tim Teknis ini adalah membantu menyampaikan data-data tentang potensi desa, merekomendasikan program kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa kepada perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Pangkep. Rekomendasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya perguruan tinggi agar dapat menghasilkan dampak yang lebih besar untuk desa serta dapat mempercepat proses penurunan kemiskinan, menentukan lokus kegiatan, serta memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan KKN Tematik. Penanggung jawab Tim Teknis ini adalah bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. Pimpinan dari Tim Teknis adalah kepala dan sekretaris Bappeda serta kepala dan sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tim Teknis UMD juga beranggotakan perwakilan dari lima belas dinas yang ada di Kabupaten Pangkep.

Dalam mewujudkan komitmen anggaran, Kabupaten Pangkep membuat inovasi dengan memperbolehkan (selanjutnya mewajibkan pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk UMD di setiap desa di Kabupaten Pangkep). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), nomenklatur anggaran yang dialokasikan bagi penyelenggaraan UMD adalah 'Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)'. Ini dapat menjadi panduan bagi desa-desa lain yang hendak menerapkan UMD-KKN Tematik bersama perguruan tinggi bahwa memungkinkan secara legal dan formal bagi pemerintah desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pengalaman selama ini, dalam penyelenggaraan KKN yang menjadi permasalahan adalah mahasiswa-mahasiswa KKN memiliki ide-ide program pembangunan yang baik dan berkualitas serta *'impactful'* namun tidak tersedia anggaran. Dengan disediakan anggaran dalam APB Desa tersebut, maka dampak UMD-KKN Tematik di desa akan lebih tinggi.

Selain itu, komitmen pembentukan lembaga yaitu Tim Teknis UMD, diperkuat dengan payung hukum yaitu SK Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 222 Tahun 2019.

### 3. Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan KKN, ketidaktersediaan sumber daya sering kali menjadi sumber permasalahan. Sumber daya sering kali dipahami secara sempit sebagai sumber daya finansial (keuangan). Perguruan tinggi perlu menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Selain sumber daya manusia, sebenarnya perguruan tinggi memiliki sumber daya yang lain unik.

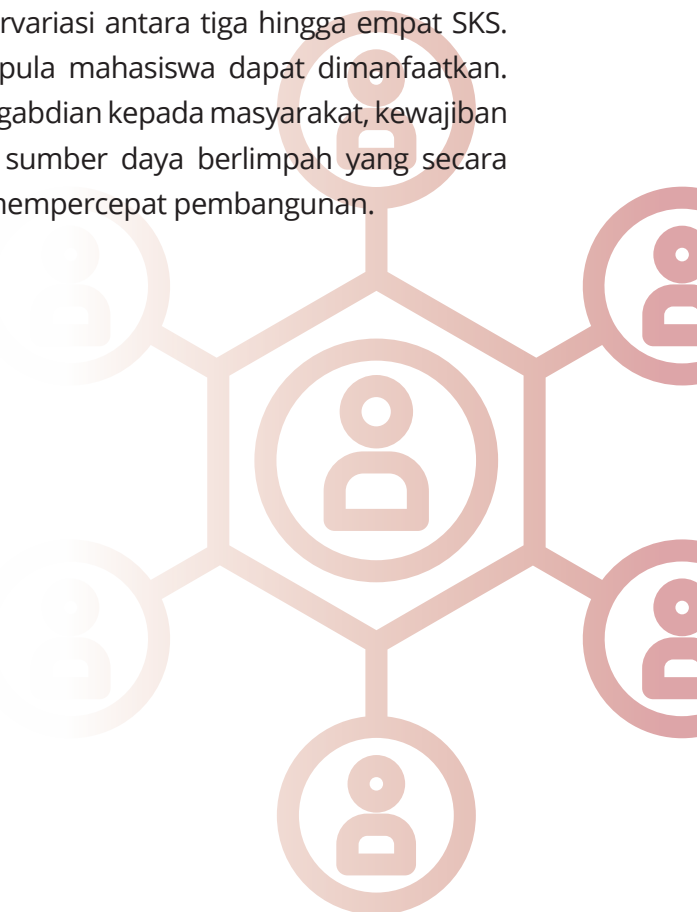
Pertama, sumber daya berupa kewajiban melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kedua, sumber daya berupa mahasiswa yang sedang berproses menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan memerlukan platform untuk berlatih menggunakan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di perguruan tinggi untuk memecahkan permasalahan yang nyata di masyarakat.

Sumber daya tersebut juga perlu dipahami oleh pemerintah daerah kabupaten sebagai aset lokal yang tersedia untuk mendorong percepatan pembangunan di desa terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.<sup>1</sup>

Mahasiswa merupakan sumber daya berlimpah kedua yang dimiliki oleh perguruan tinggi, di mana mahasiswa berkewajiban menyelesaikan sejumlah kredit (berupa SKS) untuk menyelesaikan proses belajarnya dan mendapatkan gelar yang menunjukkan keahlian tertentu. Bagian dari kredit yang harus diselesaikan oleh mahasiswa di Indonesia adalah melaksanakan KKN. Besaran kredit untuk KKN bervariasi antara tiga hingga empat SKS. Selama perguruan tinggi masih ada, selama itu pula mahasiswa dapat dimanfaatkan. Seperti halnya kewajiban pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat, kewajiban melaksanakan KKN oleh mahasiswa merupakan sumber daya berlimpah yang secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat pembangunan.

---

<sup>1</sup> (Forum Kolaborasi, KOMPAK, 2019)



## 4. Pemanfaatan Jejaring Multipihak, Perluas Dampak

KOMPAK sebagai inisiator model UMD berharap bahwa UMD-KKN Tematik ini akan terus berlanjut, bergulir, dan terus dilaksanakan sebagai hasil kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa meskipun KOMPAK telah menyelesaikan mandatnya nanti di tahun 2022.

Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan KOMPAK dalam melaksanakan UMD juga telah memiliki bekal berupa kerja sama dengan pemerintah daerah. Modal penting bagi keberhasilan pelaksanaan KKN dengan model apa pun adalah kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang berkomitmen penuh dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Keberadaan KOMPAK saat ini menjadi jembatan yang memfasilitasi agar pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Dari berbagai pengalaman perguruan tinggi yang melaksanakan UMD-KKN Tematik, perbedaan antara KKN konvensional dengan model UMD-KKN Tematik terletak pada interaksi yang intensif dengan berbagai pihak dan saling melengkapi dengan pemerintah daerah. Interaksi intensif yang difasilitasi pihak ketiga sebagai penghubung antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah memang menjadi keuntungan tersendiri. Adanya hubungan hierarkis antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa mendorong komitmen dari pemerintah daerah yang akan diikuti oleh komitmen pemerintah desa.

Tanpa kehadiran pihak ketiga seperti KOMPAK, perguruan tinggi harus memanfaatkan jejaring yang telah dimiliki untuk melaksanakan model UMD-KKN Tematik, selain menginisiasi jaringan baru. Kerja sama yang telah dimiliki dengan kementerian atau lembaga lain tentu saja dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan UMD. Selain kementerian, kerja sama yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi dengan *stakeholder* yang bidang kerjanya terhubung dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah atau pembangunan desa dapat menjadi bekal untuk pelaksanaan model UMD.

Masih terkait jejaring, perwujudan pembangunan desa yang sadar akan kesetaraan gender dan inklusi sosial pada praktiknya selalu memerlukan kerja-kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan LSM. UMD-KKN Tematik perlu mengupayakan upaya kolaborasi ini, termasuk melibatkan LSM yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mendampingi serta meningkatkan partisipasi kelompok rentan. Keberadaan LSM lokal yang bekerja di isu ini adalah potensi jejaring yang perlu dimanfaatkan dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik untuk mencapai tujuan pembangunan yang sensitif GESI.



### Kotak Praktik Baik 5. Pentingnya Berjejaring

Sebelum melaksanakan UMD-KKN Tematik Adminduk, Unram telah memiliki beberapa bentuk KKN Tematik yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Unram merupakan salah satu dari tiga puluh tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang melaksanakan KKN Tematik Revolusi Mental.

Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) merupakan gerakan yang berdasarkan pada Perpres nomor 87 tahun 2017. Kementerian yang menjadi *leading sector* GNRM ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). .

Sejak tahun 2019, GNRM ini tercantum dalam dokumen visi misi Presiden Joko Widodo dan diberi nama Revitalisasi Revolusi Mental. Selain dengan Kemendikbud, Unram juga melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Pesisir. KKN Tematik Danau dan Dam juga dilaksanakan oleh Unram melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Dengan pengalaman melaksanakan UMD-KKN Tematik Adminduk, Unram mampu mengembangkan jejaring dengan OPD lain selain Disdukcapil. Unram bekerja sama dengan Dinas Sosial melaksanakan KKN Tematik Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam KKN Tematik KUBE ini mahasiswa melaksanakan identifikasi dan pemetaan halangan pengembangan KUBE dan memunculkan inovasi-inovasi untuk pengembangan KUBE. Selain dengan Dinas Sosial, Unram juga melaksanakan KKN Tematik *Zero Waste* bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.





*Suasana KKN Tematik Adminduk di Desa Kalikambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.*

## D. Teknis Pengelolaan UMD-KKN Tematik

### Lembaga Pengampu dan Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik diharapkan berjalan berkelanjutan. Maka dari itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat berperan sebagai lembaga pengampu dan lembaga yang berperan sebagai pelaksana kegiatan.

Sebagai wujud dari perubahan cara pandang terhadap penyelenggaraan KKN, pemerintah daerah perlu berperan sebagai lembaga pengampu UMD-KKN Tematik. Lembaga pengampu ini perlu memiliki landasan hukum yang jelas agar berfungsi secara tepat. Berdasarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi, hambatan utama penyelenggaraan KKN adalah tidak terhubungnya pelaksanaan KKN oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sehingga menjadi tugas lembaga pengampu untuk menghubungkan pelaksanaan KKN oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Lembaga pelaksana UMD-KKN Tematik adalah perguruan tinggi yang telah berkomitmen melaksanakan UMD-KKN Tematik. Biasanya setiap perguruan tinggi memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). LPPM inilah yang dapat maju memainkan peran sebagai lembaga pelaksana. Pelaksanaan UMD-KKN Tematik juga dapat dilakukan oleh sebuah program studi yang memiliki latar belakang bidang ilmu yang spesifik untuk memecahkan masalah pembangunan di desa. Jika demikian, maka lembaga pelaksana kegiatan dapat dilakukan oleh program studi.

Mempertimbangkan bahwa UMD-KKN Tematik adalah milik bersama, maka kedua lembaga, yaitu pengampu dan pelaksana, perlu membangun dan menjalankan komunikasi yang intens dan efektif.

### Kotak Rekomendasi 6. Lembaga Pengampu

- Lembaga pengampu sebaiknya menjadi bagian dari pemerintah daerah dan memiliki aturan hukum yang jelas sebagai dasar kerja.
- Lembaga pelaksana sebaiknya menjadi bagian dari perguruan tinggi (misalnya LPPM).
- Dengan mempertimbangkan bahwa UMD adalah model KKN Tematik, dan sering kali sebuah program studi memiliki kegiatan KKN Tematik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa lembaga pelaksananya adalah program studi tertentu.
- Kedua lembaga ini harus membangun dan menjalankan komunikasi yang efektif.

### Kotak Praktik Baik 6. Tim Teknis UMD Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu contoh praktik baik bagaimana UMD-KKN Tematik diinisiasi oleh pemerintah kabupaten dengan mengambil peran dalam membentuk dan menjalankan lembaga pengampu kegiatan UMD-KKN Tematik.

Tim Teknis UMD dibentuk berdasarkan SK Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 222 Tahun 2019. Sebagai lembaga pengampu UMD-KKN Tematik, Tim Teknis UMD tersebut melakukan beberapa tahapan pekerjaan, yaitu:

1. Tim UMD-KKN Tematik melakukan kunjungan-kunjungan (*road show*) ke berbagai perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Pangkep dan sekitarnya untuk memperkenalkan Model UMD.
2. Hasil *road show* ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan antara 18 perguruan tinggi pada bulan Agustus 2019, dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU untuk melaksanakan UMD-KKN Tematik.
3. Untuk memulai pelaksanaan UMD-KKN Tematik, Tim Teknis UMD melakukan pemetaan masalah-masalah pembangunan di desa-desa di Kabupaten Pangkep yang menjadi dasar penentuan tema dan lokasi pelaksanaan UMD-KKN Tematik.
4. Tim Teknis UMD mengundang setiap perguruan tinggi yang telah menandatangani MoU UMD-KKN Tematik untuk memberikan paparan terkait bidang keahlian masing-masing.
5. Dengan informasi tentang bidang keahlian masing-masing dari perguruan tinggi tersebut, maka Tim Teknis UMD mendistribusikan desa-desa yang akan menjadi lokasi UMD-KKN Tematik beserta permasalahan dan prioritas pembangunannya masing-masing.

## 1. Tahapan Pelaksanaan

UMD-KKN Tematik merupakan kegiatan yang sepenuhnya berbasis pada KKN. Umumnya program studi di setiap perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan KKN sebagai bagian dari kurikulum, terutama untuk tingkat sarjana sehingga kegiatan KKN merupakan suatu hal yang pasti dilakukan oleh setiap mahasiswa. Ada KKN yang diselenggarakan di tingkat program studi, namun sebagian besar diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik, penyelenggaraan KKN yang terpusat di tingkat perguruan tinggi berpotensi menghasilkan perubahan yang lebih luas. Namun, tidak berarti KKN yang diselenggarakan di tingkat program studi tidak dapat dikembangkan menjadi UMD-KKN Tematik. Untuk merespons kebutuhan pembangunan yang spesifik di tingkat desa, program studi dengan keilmuan tertentu mungkin lebih tepat karena difokuskan untuk kebutuhan pembangunan tersebut. Namun, dengan keyakinan bahwa masalah pembangunan di desa jauh akan lebih efektif dipecahkan bila melibatkan berbagai perspektif, maka peserta UMD-KKN Tematik dengan berbagai latar belakang keilmuan dapat lebih efektif menciptakan solusi dari sebuah masalah dan membuat perubahan.

Upaya untuk memberikan perhatian dan pelibatan kelompok rentan perlu dipastikan dalam setiap bagian teknis pelaksanaan, baik persiapan, pelaksanaan, maupun pada tahapan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu:



Berikut ini adalah penjelasan empat tahapan utama pelaksanaan UMD-KKN Tematik tersebut.

### a. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan yang baik juga menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Dalam persiapan pelaksanaan ini, terdapat tiga aspek penting yaitu, seleksi dosen pembimbing lapangan, pembekalan dan kegiatan sebelum KKN (pra-KKN).

#### 1. Seleksi Dosen Pembimbing Lapangan

**Dosen pembimbing lapangan (DPL) merupakan salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik.** Dengan mempertimbangkan bahwa UMD-KKN Tematik merupakan laboratorium inovasi yang menyediakan ruang aman (*safe space*) bagi ide-ide inovatif pembangunan di desa, maka para mahasiswa peserta KKN memerlukan pendampingan dan panduan dari DPL yang dapat dipercaya.

**DPL yang memiliki kredibilitas didapatkan melalui rekrutmen dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang berbasis *merit*. Beberapa hal yang harus dimiliki DPL:**

- Memenuhi syarat-syarat administratif akademis tertentu, misalnya memenuhi kepangkatan akademis paling rendah Lektor, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
- Memiliki pemahaman yang cukup tentang permasalahan desa dan memiliki pengalaman melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa.
- Memiliki pribadi yang kooperatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Kesukaan bekerja di lapangan yaitu desa juga akan menjadi indikator DPL yang dapat dipercaya.
- Akan sangat baik jika DPL juga memiliki pemahaman terhadap isu-isu GESI yang sangat dekat dengan isu kemiskinan dan pembangunan desa. Namun menyadari pemahaman terhadap isu ini masih sangat terbatas bahkan di tingkat lembaga seperti universitas, dapat diadakan kegiatan pembekalan yang memuat pemberian informasi dasar mengenai isu-isu GESI.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPL juga perlu diberikan rambu-rambu pembimbingan KKN. Misalnya intensitas bimbingan kepada kelompok KKN (minimal tiga kali: saat penerjunan, *monitoring/evaluasi*, dan penarikan KKN).

## 2. Pembekalan

Pembekalan yang dilakukan secara intens menjadikan pelaksanaan UMD-KKN Tematik lebih teratur, lancar, dan memberikan hasil yang baik. Terdapat dua format pelaksanaan pembekalan bagi peserta UMD-KKN Tematik, yaitu pembekalan berjenjang dan pembekalan serentak.

**Format pembekalan berjenjang** berarti pembekalan jenjang pertama diberikan kepada para DPL, dan pembekalan jenjang kedua adalah pembekalan kepada mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik oleh DPL yang telah menerima pembekalan di jenjang pertama.

**Format pembekalan serentak** dilakukan baik kepada DPL maupun kepada mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Pemilihan format pembekalan akan sangat tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi.

Materi pembekalan dapat meliputi dua aspek. **Pertama** yaitu pembekalan mengenai perilaku-perilaku umum yang perlu ditunjukkan dan dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka melaksanakan UMD-KKN Tematik. Pembekalan ini penting sebagai upaya untuk memahami konteks budaya dan norma dalam masyarakat desa lokasi KKN. Pembekalan ini menjadi semacam dasar bagi *cross-culture understanding*, karena mahasiswa akan bekerja dalam lingkungan sosial desa yang bisa jadi berbeda dengan lingkungan yang biasa mereka temui.

Materi pembekalan **kedua** adalah pembekalan yang bersifat spesifik disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di desa. Saat pembekalan ini, perlu melibatkan berbagai pihak yang menjadi mitra dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik, misalnya OPD maupun pihak swasta melalui tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) maupun *start up*.

Melihat eratnya isu-isu GESI dalam permasalahan kemiskinan dan pembangunan desa, maka perlu dimasukkan pembahasan isu GESI dalam setiap kegiatan pembekalan yang dilakukan, baik yang menyangkut DPL maupun mahasiswa.

## 3. Pra-KKN

Selain pembekalan, mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik perlu dilengkapi juga dengan pemahaman mengenai desa dan permasalahannya yang akan menjadi lokasi UMD-KKN Tematik. Terdapat beberapa format pra-KKN dan setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan untuk memilih model pra-KKN yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Format pra-KKN dapat dilakukan melalui seminar proposal KKN, di mana kelompok mahasiswa menyusun proposal rancangan kegiatan yang akan dilakukan di desa lokasi. Untuk dapat menyusun proposal kegiatan yang relevan dengan permasalahan yang

dihadapi oleh desa, kelompok mahasiswa perlu melakukan penilaian langsung, melalui observasi dan wawancara. Hasil penilaian langsung tersebut bisa jadi akan mengubah tema KKN yang telah ditetapkan dari awal.

Jika terjadi perubahan tema, maka *roadmap* yang telah disusun oleh perguruan tinggi dapat menjadi acuan penilaian apakah usulan kegiatan dapat diteruskan atau tidak.

Proposal usulan kegiatan KKN tersebut kemudian dipresentasikan oleh kelompok mahasiswa dalam seminar yang dihadiri oleh DPL.

Setiap proposal usulan kegiatan KKN yang dipresentasikan kemudian ditinjau oleh DPL. Peninjauan terhadap proposal usulan kegiatan KKN didasarkan pada standar cakupan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Misalnya, proposal kegiatan utama harus mencakup 70%, sedangkan 30% adalah program kerja tambahan yang biasanya memberi kesempatan kepada desa untuk memberikan masukan-masukan atau permintaan-permintaan kegiatan khusus dari desa.

Alternatif format pra-KKN adalah melakukan pengenalan awal secara langsung ke desa-desa calon lokasi UMD-KKN Tematik sebelum periode KKN diselenggarakan.

Pengenalan dilakukan beberapa hari di mana perwakilan mahasiswa dan DPL mengunjungi secara langsung desa-desa lokasi UMD-KKN Tematik. Untuk kunjungan ini, mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik sudah harus terbagi dalam kelompok.

Selain itu, DPL juga sudah ditentukan akan membimbing kelompok yang mana. Dalam kunjungan tersebut, dapat dilakukan wawancara dengan perangkat desa atau penduduk yang ditemui, juga observasi terhadap kondisi terkini di desa.

### **Kotak Rekomendasi 7. Tahapan Pelaksanaan**

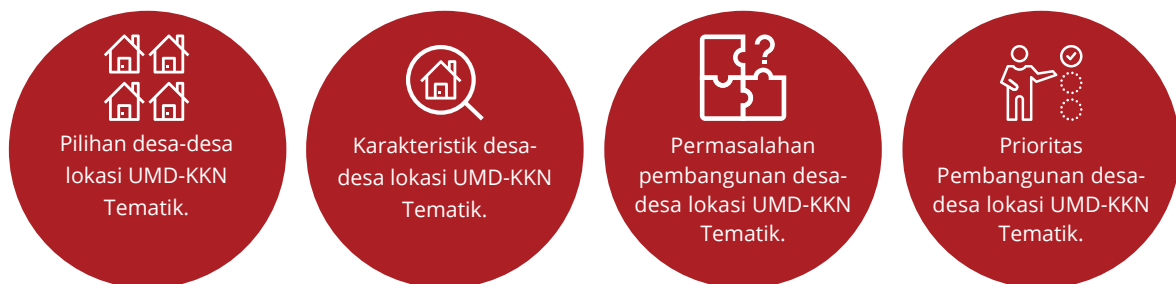
- Pembagian kelompok UMD-KKN Tematik perlu memperhatikan variasi latar belakang bidang ilmu mahasiswa sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan permasalahan di desa.
- Peserta dalam satu kelompok UMD-KKN Tematik, direkomendasikan minimal memiliki tiga latar belakang keilmuan (tiga program studi).



#### 4. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten dalam Pembekalan

Pemerintah daerah kabupaten sebagai mitra utama perlu terlibat dalam pelaksanaan pembekalan peserta UMD-KKN Tematik. Materi pembekalan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten, akan menjadi materi utama dalam pembekalan tentang permasalahan dan potensi-potensi desa.

Sebagai alternatif, pembekalan dapat juga dilakukan oleh tim teknis. Berikut ini adalah materi pembekalan yang dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten atau tim teknis:



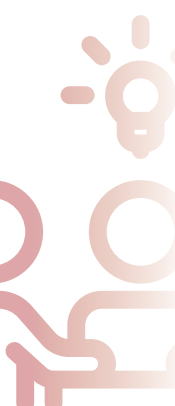
#### 5. Komunikasi

Selain pembekalan, penentu keberhasilan UMD juga terletak pada intensitas komunikasi dan koordinasi antara empat *stakeholder* utama yaitu perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan tim teknis. Komunikasi pada masa persiapan pelaksanaan merupakan hal yang krusial. Dalam komunikasi tersebut, dapat dipastikan mengenai hal-hal penting sebagai berikut:



Berdasarkan pengalaman pelaksanaan UMD-KKN Tematik, setiap perguruan tinggi memerlukan waktu 1-2 bulan untuk melakukan komunikasi dalam rangka persiapan. Komunikasi dilakukan untuk memproses dokumentasi atau surat-menyurat kepada setiap pihak yang terlibat terutama desa-desa lokasi UMD. Bagi pihak-pihak yang merencanakan melaksanakan UMD-KKN Tematik, hal ini perlu menjadi pembelajaran dan perbaikan tentang kecepatan komunikasi dan koordinasi.

### **b. Pengerjaan Mahasiswa ke Desa-desa Lokasi UMD-KKN Tematik**



Tahapan UMD-KKN Tematik selanjutnya yaitu pengerjaan mahasiswa ke desa-desa lokasi. Pada saat pengerjaan, mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik telah siap dalam berbagai aspek baik dari kesiapan mental maupun program kegiatan melalui pembekalan. Sedangkan kesiapan program kegiatan, mahasiswa telah disiapkan melalui pra-KKN.

Pada pengerjaan mahasiswa UMD-KKN Tematik ini, rambu-rambu pelaksanaan kegiatan dipastikan telah dipahami oleh seluruh peserta. Perlengkapan kegiatan KKN terutama alat dan bahan untuk pelaksanaan dan pelaporan kegiatan juga harus sudah diserahkan kepada mahasiswa.

Mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik perlu dibekali dengan buku jurnal harian sebagai alat dokumentasi kegiatan serta dasar penulisan laporan kegiatan.

### **c. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang Telah Direncanakan dan *Monitoring* oleh Dosen Pembimbing Lapangan**

Idealnya, pelaksanaan kegiatan di desa mitra yang dirancang dalam model UMD-KKN Tematik dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Hal ini mempertimbangkan bahwa pembangunan di desa dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Namun, model UMD-KKN Tematik memang dilaksanakan sebagai bagian dari kurikulum dan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan dibatasi oleh kerangka waktu, yaitu tahun akademik.

Pengaturan tahun akademik setiap perguruan tinggi berbeda-beda, namun pada umumnya terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Biasanya di semester genap terdapat libur semester yang cukup lama untuk dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan UMD-KKN Tematik di desa selama 30-45 hari tanpa mengganggu pelaksanaan perkuliahan.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan UMD-KKN Tematik di desa juga diselenggarakan di akhir semester ganjil atau bahkan selama satu semester berjalan. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi yang penyusunan kurikulumnya harus mengakomodasi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu tujuh semester dengan jumlah SKS minimal 144 SKS.

Menyesuaikan dengan desain kurikulum yang ada, maka satu-satunya kesempatan untuk penyelenggaraan UMD-KKN Tematik adalah di akhir semester genap, yaitu antara bulan Juli atau Agustus tahun berjalan.

Bagi perguruan tinggi yang memiliki keleluasaan untuk menyusun kurikulum dengan lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh keharusan menyediakan desain kurikulum yang memungkinkan mahasiswa lulus dalam waktu tujuh semester, maka pelaksanaan UMD-KKN Tematik bisa dilakukan di setiap semester dan disebar habis dalam empat belas sampai dengan enam belas minggu dalam semester berjalan tersebut.

Namun, di semester mana pun UMD-KKN Tematik dilaksanakan, rangkaian pelaksanaan UMD-KKN Tematik diselenggarakan selama satu semester. Masa persiapan yang telah dijelaskan pada nomor satu di atas juga dilaksanakan pada semester yang berlangsung tersebut.

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik mengutamakan perencanaan yang matang dan panduan yang mendetail untuk mengoptimalkan keberadaan mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik selama berada di desa dalam periode antara 30-45 hari tersebut, sehingga perencanaan harian selama masa pelaksanaan UMD-KKN Tematik sejak hari pertama di desa sudah dipersiapkan dengan matang.

#### **d. Pelaporan dan Evaluasi**

Selain *roadmap*, lembaga pengampu dan pelaksana kegiatan UMD-KKN Tematik harus membuat pedoman evaluasi dan pelaporan. yang sebaiknya mencakup:

- a. Pedoman seleksi DPL
- b. Pedoman evaluasi kinerja DPL
- c. Pedoman pelaksanaan pembekalan
- d. Pedoman pelaksanaan pra-KKN
- e. Pedoman penyusunan proposal kegiatan UMD-KKN Tematik yang dapat digunakan bagi perguruan tinggi yang menerapkan model pra-KKN
- f. Pedoman *Monitoring/Pengawasan* Pelaksanaan Kegiatan UMD-KKN Tematik oleh DPL
- g. Buku harian jurnal kegiatan yang harus diisi oleh peserta setiap hari selama melaksanakan UMD-KKN Tematik di desa mitra
- h. Pedoman penyusunan laporan kegiatan UMD-KKN Tematik yang menekankan pada dua hal penting, yaitu (1) *output* yang merupakan deskripsi-deskripsi



perubahan yang terjadi dan (2) rekomendasi kegiatan lanjutan. Laporan ini akan menjadi dokumen penting untuk disimpan pemerintah desa dan menjadi rujukan untuk keberlanjutan UMD-KKN Tematik.

i. Pedoman pelaksanaan seminar laporan kegiatan UMD-KKN Tematik.

Pedoman-pedoman tersebut menjadi dokumen penting, yaitu sebagai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pelaksanaan UMD-KKN Tematik dari periode persiapan sampai penarikan. Beberapa alternatif pelaporan dan evaluasi UMD-KKN Tematik juga perlu dipersiapkan. Sebagai catatan penting, *monitoring* sebagai bagian dari aktivitas evaluasi perlu dilaksanakan beberapa kali selama pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

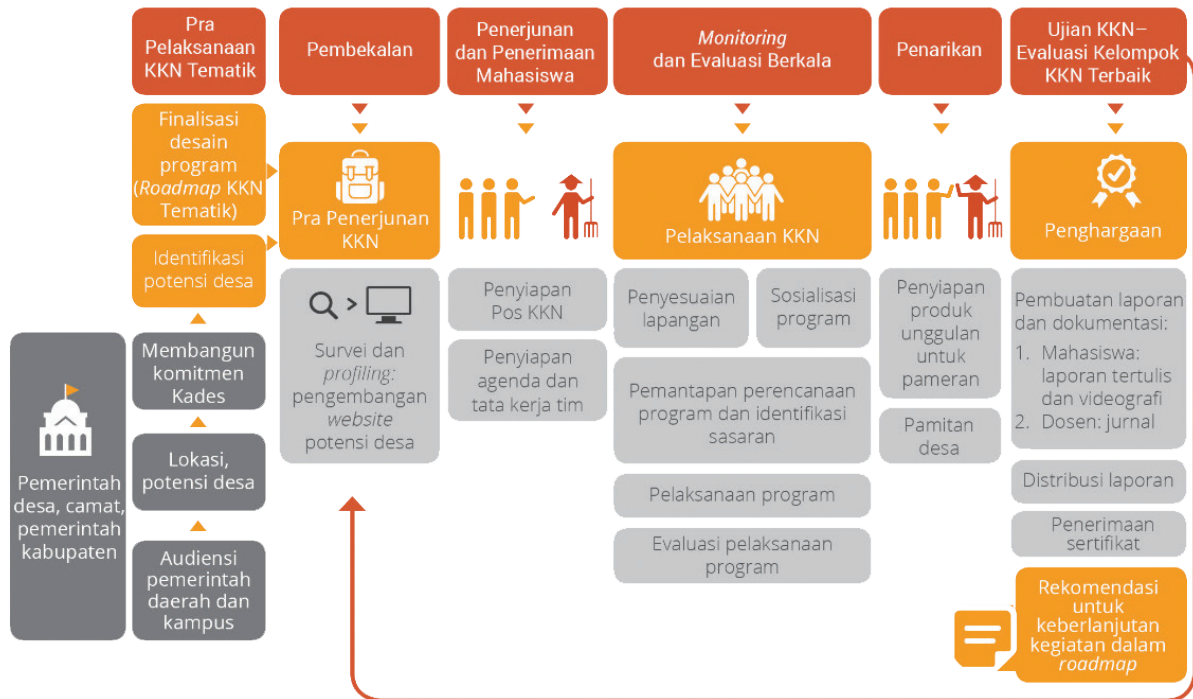
*Monitoring* sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan UMD-KKN Tematik perlu dilakukan secara reguler minimal tiga kali, yaitu pada saat penerjunan mahasiswa ke wilayah desa mitra, selama mahasiswa berada di wilayah desa mitra, dan pada saat penarikan mahasiswa dari wilayah desa mitra. *Monitoring* oleh DPL dilakukan dengan menggunakan Pedoman *Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan UMD-KKN Tematik*.

Pelibatan kelompok rentan dalam tahapan *monitoring* penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan kelompok ini terinformasi atas proses dan hasil kegiatan pembangunan di desanya. Program dapat merencanakan untuk mengundang perwakilan kelompok-kelompok rentan untuk hadir, dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas (waktu, jarak, lokasi, metode penyampaian informasi) dari kegiatan ini bagi kelompok rentan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan UMD-KKN Tematik dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu:

1. **Melalui laporan tertulis** sesuai dengan pedoman laporan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi pengampu dan pelaksana UMD-KKN Tematik. Dokumen laporan tertulis pelaksanaan UMD-KKN Tematik perlu ditinggal di desa dan menjadi dokumen penting milik pemerintah desa.
2. **Melalui kegiatan seminar** yang mengundang kepala desa dan perangkat pemerintahan desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat desa. Camat dan perangkat pemerintahan kecamatan juga perlu diundang sebagai audiens dalam seminar tersebut. Dalam seminar, setiap kelompok mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik melakukan pemaparan seluruh kegiatan UMD-KKN Tematik beserta *output* dan dampaknya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
3. **Melalui pelaporan dalam bentuk festival atau expo** di mana mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik menampilkan hasil kegiatan di masing-masing kios/*booth* pameran. Festival seperti ini memungkinkan peserta UMD-KKN Tematik untuk melibatkan warga desa mitra.

**Alur yang Direkomendasikan untuk Pelaksanaan UMD-KKN Tematik**  
(Diadopsi dari alur pelaksanaan UMD-KKN Tematik Unej)



**2. Indikator yang Terukur Dalam Setiap Model UMD-KKN Tematik**

Pelaporan *output* dan dampak dari pelaksanaan UMD-KKN Tematik harus sesuai dengan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan dari awal. UMD-KKN Tematik memiliki target perubahan yang telah dijelaskan di bagian awal panduan ini yang menjadi dasar dalam penentuan indikator-indikator capaian.

Target perubahan UMD-KKN Tematik terdiri dari dua aspek yaitu:

- Target perubahan yang ditetapkan oleh masing-masing universitas yang tercantum dalam *roadmap* UMD-KKN Tematik.
- Target perubahan yang sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Dua target tersebut harus disinkronkan dan disepakati terlebih dahulu sehingga perlu dilakukan diskusi diantara berbagai OPD untuk menyepakati fokus dan lokus dari UMD-KKN Tematik untuk menetapkan indikator-indikator capaian yang dapat dikomunikasikan dan disinkronkan dengan target perubahan dari perguruan tinggi. Sinkronisasi target perubahan dari pemerintah kabupaten dengan perguruan tinggi merupakan salah satu tugas dari Tim Teknis UMD-KKN Tematik.

### **Kotak Praktik Baik 7. Indikator yang Terukur, KKN Tematik Adminduk Unram**

Secara nasional, Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten dengan capaian target nasional yang rendah. Rendahnya kepemilikan dokumen adminduk menjadi salah satu indikator penghambat pencapaian program-program pembangunan. Hal ini dikarenakan tanpa dokumen adminduk yang valid dan update, penghitungan dan penargetan sasaran program-program pemerintah, salah satunya penanggulangan kemiskinan menjadi rentan salah sasaran. Untuk menjawab terkait validasi data penduduk dengan informasi detailnya, maka perbaikan data baik melalui BPS maupun data di SIAK menjadi prioritas bagi kabupaten Lombok Utara.

UMD-KKN Tematik Adminduk yang diselenggarakan oleh UNRAM sebagai respons atas prioritas tersebut dilaksanakan dengan indikator yang sangat jelas, yaitu pencapaian tertib administrasi kependudukan melebihi target nasional sebesar 87% dengan rata-rata peningkatan di atas 0,5%. Hasil dari UMD-KKN Tematik Adminduk adalah 92% dengan rata-rata peningkatan sampai dengan 2%.

### **Kotak Rekomendasi 8. Indikator yang Terukur**

- Dalam hal perguruan tinggi menginisiasi UMD-KKN Tematik, maka indikator capaian pelaksanaan UMD-KKN Tematik harus selalu terukur dengan didasarkan pada *roadmap* yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- Dalam menyusun *roadmap* UMD-KKN Tematik jangka menengah tersebut, perguruan tinggi perlu melakukan riset untuk mengidentifikasi berbagai desa yang akan menjadi desa mitra serta permasalahannya.
- Hasil identifikasi harus dikonsultasikan kepada pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi kesalahan penentuan desa mitra sebagai lokasi UMD-KKN Tematik.
- Dalam kondisi di mana calon desa mitra telah menjadi lokasi UMD-KKN Tematik sebelumnya, maka dalam tahapan pra-KKN, baik DPL maupun mahasiswa harus melakukan identifikasi rekomendasi-rekomendasi dari UMD-KKN Tematik sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan capaian indikator dan juga menjamin keberlanjutan capaian *roadmap* yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- Sediakan format khusus atau matriks indikator capaian untuk setiap kegiatan UMD-KKN Tematik yang digunakan sebagai alat komunikasi dan sinkronisasi indikator capaian dengan yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten.
- Dalam hal inisiasi UMD-KKN Tematik yang berasal dari pemerintah kabupaten, maka pemerintah kabupaten perlu melibatkan perguruan tinggi secara intensif dan mendalam pada saat penyusunan RPJMD teknokratik.

- Dalam penyusunan RPJMD teknokratik tersebut, perguruan tinggi dapat menyesuaikan *roadmap* UMD-KKN Tematik dan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya dengan kebutuhan pembangunan pemerintah kabupaten.
- Melalui penyusunan RPJMD teknokratik dengan keterlibatan semua OPD, maka akan tercipta rasa kepemilikan OPD terhadap UMD-KKN Tematik.
- Selain menciptakan rasa kepemilikan, hal tersebut diharapkan dapat membuahkan komitmen alokasi anggaran dari setiap OPD untuk pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa setiap aktivitas pembangunan di lingkup pemerintah kabupaten terdapat di setiap OPD tentu dilengkapi dengan anggaran. Aktivitas pembangunan yang didukung dengan anggaran inilah yang dapat dikoordinasikan menjadi kegiatan dalam UMD-KKN Tematik. Dengan demikian, indikator-indikator capaian UMD-KKN Tematik jelas dan terukur.

### 3. Potensi Keberlanjutan Model UMD-KKN Tematik

Bila UMD-KKN Tematik sebagai bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah telah dilaksanakan, maka aspek keberlanjutan atau kesinambungan program ini perlu dipertimbangkan melalui beberapa aspek di bawah ini:

#### 1. Formalisasi

Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menjamin keberlanjutan UMD-KKN Tematik adalah dengan melakukan formalisasi terhadap kolaborasi tersebut dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/MoU. Berdasarkan pengalaman yang ada, banyak perjanjian kerja sama yang berhenti di penandatanganan perjanjian saja tanpa ada kelanjutan kegiatan atau aktivitas bersama dengan berbagai alasan. Sehingga kolaborasi UMD-KKN Tematik tersebut harus dilengkapi dengan desain awal yang matang mengenai kesepakatan pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

#### 2. Desain Awal

Dalam desain awal, pihak pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa setiap perguruan tinggi yang terlibat dalam kolaborasi UMD-KKN Tematik ini akan mendampingi desa-desa tertentu dalam beberapa periode, sehingga lokus kerja yaitu desa mitra antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya tidak tumpang tindih. Bagi perguruan tinggi, aspek ini akan terdokumentasikan dalam *roadmap* UMD-KKN Tematik.

#### 3. Dokumentasi hasil UMD-KKN Tematik

Selain *roadmap* UMD-KKN Tematik masing-masing perguruan tinggi, cara lain untuk memastikan bahwa UMD-KKN Tematik akan berkelanjutan adalah dengan memastikan

bahwa pemerintah desa memiliki dokumen-dokumen hasil UMD-KKN Tematik yang mencantumkan secara jelas:

- Kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan,
- Hasil yang dicapai beserta dampak yang timbul, dan
- Bagian yang paling penting adalah rekomendasi-rekomendasi untuk pelaksanaan UMD-KKN Tematik berikutnya.

#### **4. Pelembagaan komitmen**

Hal lain yang dapat menjamin potensi keberlanjutan UMD-KKN Tematik adalah pelembagaan komitmen yang dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga yaitu pembentukan Tim Teknis UMD-KKN Tematik yang didasarkan pada SK Bupati dan penerbitan aturan yaitu Peraturan Bupati yang mewajibkan desa untuk mengalokasikan sebagian dari Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan UMD-KKN Tematik.

#### **5. Penelitian dan Penyelenggaraan Praktik Baik**

Keberlanjutan model UMD-KKN Tematik dapat dilakukan oleh dua aktor, yaitu perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten.

Di lingkup perguruan tinggi, mahasiswa dapat melanjutkan kegiatan UMD-KKN Tematik sebagai topik penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sarjana. Hal ini berlaku juga bagi DPL yang dapat terus menggali ide-ide penelitian berdasarkan pengalaman melaksanakan UMD-KKN Tematik.

Pelaksanaan UMD-KKN Tematik yang berkesinambungan juga dapat dimanfaatkan sebagai ide kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diajukan kepada Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEK-BRIN) untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara kolektif, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lokus dan fokus desa mitra UMD-KKN Tematik dapat menjadikan perguruan tinggi tersebut sebagai *center of excellence* dalam pembangunan desa.

Di lingkup pemerintahan daerah, pengalaman menyelenggarakan UMD-KKN Tematik dapat menjadi praktik baik (*best practices*) dan pengalaman pembelajaran (*lesson learned*) bagi pemerintah daerah lain. Berbagai cerita praktik baik tentang bagaimana program yang didorong melalui UMD-KKN Tematik membawa manfaat bagi kelompok miskin dan rentan juga penting untuk didokumentasikan sebagai pembelajaran. Diharapkan agar pemerintah di wilayah lain tidak hanya terinspirasi menciptakan perubahan, tetapi juga belajar mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif.



Pemerintah daerah yang telah memiliki pengalaman berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UMD-KKN Tematik dapat menjadi mentor bagi pemerintah daerah yang lain. Proses mentoring dapat dilakukan terhadap OPD-OPD yang strategis sesuai dengan prioritas masing-masing pemerintah daerah dalam sebuah aktivitas yang bersifat *peer-to-peer learning*.

Selain di tingkat pemerintah daerah, mentoring dapat juga dilakukan oleh pemerintah desa, misalnya kepala desa. Sehingga kepala desa juga melakukan peran peningkatan kapasitas dan menelurkan pemimpin yang lain. Dengan demikian, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memenuhi peran yang tepat sebagai pemimpin, yaitu menghasilkan pemimpin yang lain sehingga memastikan regenerasi pemimpin yang baru.

#### 4. Potensi Pengembangan dan Perluasan

Selain berkelanjutan, UMD-KKN Tematik juga memiliki potensi untuk diperluas dalam dua aspek, yaitu dari aspek pelaksanaan dan dari aspek hasil KKN.

Dari aspek pelaksanaan, pengembangan dan perluasan dapat dilakukan dengan berfokus kepada **penambahan jumlah desa** yang menjadi desa mitra pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Perguruan tinggi berkonsultasi dengan pemerintah daerah sehingga sesuai dengan rencana pembangunan desa di lingkup pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki *roadmap* jangka menengah untuk setiap desa mitra, maka penambahan jumlah desa mitra UMD-KKN Tematik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Perlu menjadi catatan penting bahwa penambahan desa tidak menjadikan kolaborasi dengan desa sebelumnya menjadi terputus.

Pengembangan dan perluasan juga dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan berfokus kepada **penambahan jumlah perguruan tinggi** yang dilibatkan dalam kolaborasi penyelenggaraan UMD-KKN Tematik. Perguruan tinggi yang dapat terlibat sebaiknya tidak dibatasi dengan batasan-batasan wilayah otoritas. Dengan demikian, pemerintah daerah sebaiknya terbuka untuk bekerja sama dan mengundang perguruan tinggi mana pun, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, yang berkomitmen bekerja bersama pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan di desa mitra melalui UMD-KKN Tematik.

Dalam hal pengembangan dan perluasan hasil UMD-KKN Tematik di lingkungan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah terlebih dahulu harus memastikan setiap OPD menganggap UMD-KKN Tematik adalah sebuah kebutuhan dan perguruan tinggi adalah mitra yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah

daerah juga perlu melakukan edukasi sehingga setiap OPD percaya bahwa UMD-KKN Tematik bermanfaat.

Pengembangan dan perluasan hasil dapat dilakukan dengan dua cara:

1. **Pemerintah daerah berbagi hasil UMD-KKN Tematik kepada OPD lain sehingga dapat menggunakan hasil UMD-KKN Tematik tersebut.** Sebagai contoh, UMD-KKN Tematik Adminduk di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang berhasil menghasilkan data-data kependudukan terkini dan tervalidasi. Hasil berupa pemutakhiran data-data kependudukan tersebut pada awalnya dipegang oleh Disdukcapil kabupaten. Selanjutnya, data-data tersebut dibagikan kepada Dinas Sosial sehingga Dinas Sosial memiliki data yang sama.
2. **Pemerintah daerah perlu meminta OPD lain yang belum menjadi *leading sector* dalam UMD-KKN Tematik mengambil peran sebagai *leading sector* dalam UMD-KKN Tematik berikutnya.** Artinya tema UMD-KKN Tematik akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD-OPD tersebut, sehingga OPD pada akhirnya akan terbuka untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan melaksanakan UMD-KKN Tematik.

### Kotak Rekomendasi 9. Pengembangan dan Perluasan

- Upaya pengembangan dan perluasan akan lebih mudah dilaksanakan bila ada kepercayaan dari berbagai aktor yang akan melaksanakan UMD-KKN Tematik. Kepercayaan timbul bila ada bukti bahwa UMD-KKN Tematik ini menghasilkan manfaat bagi desa. Desa mitra dapat menjadi mentor bagi desa yang ingin melaksanakan UMD-KKN Tematik, karena dapat menunjukkan bukti kuat manfaat UMD-KKN Tematik. Sehingga, mengidentifikasi desa mitra UMD-KKN Tematik yang dapat berbagi praktik baik dan menjadi mentor penting.
- Upaya *scale-up* memerlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif dan intensif terhadap perguruan tinggi lain, pemerintah desa lain dan pemerintah daerah yang lain yang potensial melaksanakan UMD-KKN Tematik.
- Upaya pengembangan dan perluasan juga dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan *sharing*, *mentoring* dan *peer-to-peer learning*.
- Upaya pengembangan dan perluasan UMD-KKN Tematik harus dilaksanakan melalui kolaborasi multipihak, dengan melibatkan pemerintah pusat, dan aktor non-pemerintah lainnya seperti sektor swasta melalui program CSR, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

### **Kotak Praktik Baik 8. Pengembangan dan Perluasan – Unej Goes to Pangkep**

UMD-KKN Tematik 'Universitas Jember (Unej) Goes to Pangkep' merupakan salah satu praktik baik dalam hal *scale-up* baik dalam aspek pelaksanaan maupun aspek hasil. Universitas Jember berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep dan difasilitasi oleh KOMPAK, melaksanakan UMD-KKN Tematik di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro. Unej melakukan *scale-up* dengan cara menambah jumlah desa mitra dan pemerintah kabupaten mitra UMD-KKN Tematik.

Setelah UMD-KKN Tematik 'Unej Goes to Pangkep' diselesaikan, Pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan perluasan lanjutan dengan cara melibatkan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep dan Propinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan UMD-KKN Tematik berikutnya.

### **Kotak Praktik Baik 9. Pengembangan dan Perluasan – Universitas Katolik Parahyangan**

Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) merupakan salah satu dari empat perguruan tinggi mitra KOMPAK dalam uji coba UMD-KKN Tematik di tahun 2016. UMD-KKN Tematik dilakukan oleh Unpar di tiga desa mitra di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Setelah Unpar menyelesaikan UMD-KKN Tematik dengan tema pemutakhiran data desa, Unpar juga melakukan perluasan model UMD-KKN Tematik secara mandiri. Menggunakan model UMD-KKN Tematik yang sama, Unpar menginisiasi kerja sama dengan Asosiasi Administrasi Publik Indonesia (*Indonesian Association of Public Administration/IAAPA*) dengan melakukan kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Replikasi Model UMD-KKN Tematik kepada 21 perguruan tinggi. Perluasan ini dilanjutkan dengan kegiatan UMD-KKN Tematik pemutakhiran data desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

### **Kotak Praktik Baik 10. Pengembangan dan perluasan – UIN Ar-Raniry**

UIN Ar-Raniry melaksanakan model UMD melalui KPM/KKN Tematik terkait pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dalam tiga angkatan. *Output* dari KPM ini keahlian memproduksi kerajinan berbasis bahan enceng gondok di desa-desa dampingan. Inspirasi dari UMD ini kemudian menjadi salah satu inisiasi awal pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi se-Aceh untuk penanggulangan kemiskinan. Semua kampus anggota Konsorsium sepakat mengadopsi Model UMD-KKN/KPM Tematik ke depan sebagai salah satu model kegiatan pengabdian masyarakat mereka. Dalam hal ini kampus menjadi mitra dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh sehingga memberi peluang untuk mereplikasi model UMD pada sebagian besar kampus di Aceh.

## **5. Perhitungan Pembiayaan**

Pembiayaan UMD-KKN Tematik menekankan kontribusi semua pihak yang berkomitmen berkolaborasi melaksanakan UMD-KKN Tematik. Kolaborasi didasarkan pada pemahaman bahwa perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia, sedangkan pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan. Dua sumber daya ini dipertemukan dalam kegiatan UMD-KKN Tematik.

Dalam pelaksanaan KKN konvensional, seluruh pembiayaan selama ini ditanggung oleh perguruan tinggi pelaksana KKN. Namun dengan pembiayaan oleh perguruan tinggi tersebut, hasil dan dampak yang dihasilkan dari KKN konvensional justru kurang bermanfaat bagi pembangunan di desa. Hal ini diperparah dengan kebiasaan di beberapa desa yang menunjukkan ketergantungan mereka pada bantuan dari luar desa. Kebiasaan tersebut misalnya adalah meminta mahasiswa KKN melaksanakan kegiatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan desa namun tanpa kontribusi dari masyarakat atau pemerintah desa sama sekali. Hal ini menempatkan mahasiswa peserta KKN konvensional, juga perguruan tinggi, sebagai pendonor atau sinterklas. Permintaan khusus ini tentu menempatkan mahasiswa peserta KKN berada pada posisi sulit untuk menolak. Yang terutama, karena tidak ada rasa kepemilikan dari pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap aktivitas atau program yang dilaksanakan dalam KKN konvensional. Untuk itu, dalam hal pembiayaan pelaksanaan UMD-KKN Tematik perlu desain awal yang jelas tentang komitmen masing-masing pihak dalam pembiayaan ini.

Dalam UMD-KKN Tematik, pembiayaan merupakan kontribusi bersama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Untuk dapat menentukan besaran atau detail kontribusi masing-masing pihak, maka terlebih dahulu perguruan tinggi perlu melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik.

Pembiayaan kegiatan UMD-KKN Tematik bergantung pada bidang atau jenis dan cakupan kegiatan yang dikerjakan dalam KKN Tematik, namun secara garis besar faktor-faktor pembiayaan akan terdiri dari dua unit biaya, yaitu:

1. Biaya hidup mahasiswa, terdiri dari biaya pemondokan, biaya listrik dan atau air, serta biaya makan dan keperluan pribadi masing-masing mahasiswa selama tinggal di desa mitra.
2. Biaya pelaksanaan program-program yang telah disepakati dalam UMD-KKN Tematik, yang terdiri dari biaya pelaksanaan kegiatan pembekalan, biaya untuk DPL, serta biaya transportasi pemberangkatan dan penjemputan mahasiswa dari lokasi desa mitra.

Mahasiswa mengikuti kegiatan UMD-KKN Tematik sebagai bagian dari SKS yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar, sehingga mahasiswa telah membayar atau berkontribusi bagi penyelenggaraan kegiatan ber-SKS ini.

Namun, pihak perguruan tinggi dan pemerintah daerah secara bersama-sama perlu merencanakan aspek biaya hidup mahasiswa selama pelaksanaan UMD-KKN Tematik di desa mitra. Mahasiswa peserta dapat berkontribusi menanggung biaya hidup selama pelaksanaan kegiatan. Namun karena UMD-KKN Tematik merupakan bagian dari perkuliahan, diusahakan agar mahasiswa tidak lagi harus menanggung biaya pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dapat berkontribusi terhadap biaya hidup dengan menyediakan rumah pemondokan gratis bagi peserta sehingga mengurangi beban mahasiswa peserta UMD-KKN Tematik.

Selain itu, kontribusi perguruan tinggi dalam pembiayaan pelaksanaan UMD-KKN Tematik adalah dalam aspek pendanaan untuk kegiatan pembekalan, pra-KKN, kunjungan DPL ke desa mitra selama penyelenggaraan, serta biaya transportasi pada saat penerjunan dan penarikan mahasiswa peserta.

Dengan memperhatikan bahwa perguruan tinggi menanggung biaya pelaksanaan UMD-KKN Tematik dalam beberapa aspek, dan karena UMD-KKN Tematik merupakan kebutuhan pemerintah daerah dan pemerintah desa, maka baik bila pihak pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dapat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam UMD-KKN Tematik. Anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut dapat bersumber dari APB Desa atau anggaran-anggaran yang melekat pada OPD-OPD di lingkungan pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan UMD-KKN Tematik.

### **Kotak Rekomendasi 10. Pembiayaan**

- Perguruan tinggi dalam melaksanakan KKN konvensional menanggung seluruh pembiayaan pelaksanaan KKN. Namun dalam model UMD-KKN Tematik yang menekankan pada kolaborasi, pembiayaan bersama merupakan wujud nyata komitmen dari kolaborasi tersebut.
- Pemerintah daerah harus yakin bahwa UMD-KKN Tematik merupakan sebuah kebutuhan, sehingga pemerintah daerah juga harus berkomitmen dalam hal pembiayaan.
- Komitmen pembiayaan oleh pemerintah daerah bukanlah sesuatu yang sulit. Hanya diperlukan pengaturan waktu yang tepat (*good timing*) untuk menyelaraskan rencana UMD-KKN Tematik dengan rencana kegiatan-kegiatan di setiap OPD.
- Di setiap OPD sebenarnya sudah tersedia sejumlah dana untuk pelaksanaan kegiatan yang berfokus desa.
- Di setiap OPD atau dinas yang bersifat teknis, pelaksanaan program kerja biasanya ada yang dilaksanakan untuk lingkup desa. Kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan program kerja ini dapat disinkronkan dengan pelaksanaan UMD-KKN Tematik.



*Mahasiswa Unram dalam kegiatan KKN Tematik Adminduk di Desa Pemenang Timur, Kabupaten Lombok Utara*

## Penutup

Buku Panduan Teknis Pelaksanaan UMD-KKN Tematik ini diharapkan dapat menjadi panduan baik bagi perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa yang hendak melakukan inisiasi UMD-KKN Tematik.

UMD-KKN Tematik adalah sebuah perubahan yang ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan KKN sebagai aset bangsa dalam mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Memulai perubahan memang tidak mudah, apalagi perubahan yang melibatkan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Buku Panduan Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan konseptual dan panduan praktis untuk memulai perubahan tersebut.

Dari buku panduan teknis ini diharapkan muncul berbagai ide kegiatan-kegiatan mentoring atau *peer-to-peer learning* antar perguruan tinggi maupun antar pemerintah daerah untuk memulai dan melaksanakan model UMD-KKN Tematik.



## Metode Penyusunan Panduan Teknis UMD-KKN Tematik

Penyusunan Dokumen Panduan Teknis UMD-KKN Tematik didasarkan pada data-data primer dan sekunder. Data-data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen laporan kegiatan UMD-KKN Tematik tahap inisiasi dan tahap replikasi. Data-data primer merupakan hasil wawancara dengan beberapa pihak, yaitu:

1. Tim Inovasi KOMPAK, Jakarta.
2. Bapak Nasthain Gasba, District Coordinator KOMPAK di Kabupaten Pangkep.
3. Ibu Susana Dewi, KOMPAK, NTB.
4. Ibu Sitti Hilyana dan Bapak Fatur Rahman, LP2M Unram.
5. Perwakilan perguruan tinggi pelaksana UMD-KKN Tematik di Kabupaten Pangkep (Universitas Fajar, Universitas Islam Makassar, Universitas Maros, Universitas Megarezky).
6. Bapak Arif Aryadi S.P., Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lombok Utara.
7. Bapak Dr. Abdul Gaffar, S.T., M.Si., Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep.
8. Sumber-sumber sekunder berupa dokumen-dokumen yang dimiliki KOMPAK.

## **Contact Person**

### **Mitra Ujicoba Model Universitas Membangun Desa**

#### **UIN Ar Raniry**

Lukman Ibrahim ([lukman.uny10@gmail.com](mailto:lukman.uny10@gmail.com))

Prof. Eka Sri Mulyani ([srimulyanieka@gmail.com](mailto:srimulyanieka@gmail.com))

#### **UIN Alauddin**

Siti Aisyah ([aisysipala@gmail.com](mailto:aisysipala@gmail.com))

#### **Universitas Katolik Parahyangan**

Tutik Rachmawati ([tutikr@unpar.ac.id](mailto:tutikr@unpar.ac.id))

#### **Universitas Jember**

Hermanto Rohman ([hermanto.fisip@unej.ac.id](mailto:hermanto.fisip@unej.ac.id))



# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

ISBN 978-623-6080-12-2 (PDF)



9 786236 080122